

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

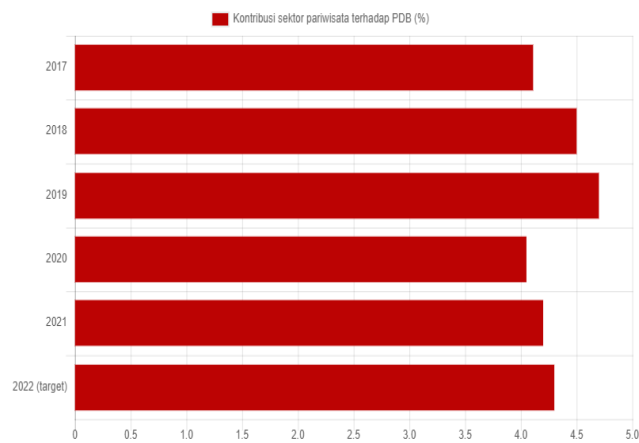
### **1.1.Latar Belakang Masalah**

*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah suatu kesepakatan pembangunan global yang berisi 17 tujuan dan 169 target rencana aksi global untuk 15 tahun kedepan berlaku sejak 2015-2030. 17 tujuan SDG's tersebut meliputi kemiskinan; kelaparan; kehidupan sehat; pendidikan berkualitas; kesetaraan gender; air bersih dan sanitasi layak; energi bersih dan terjangkau; pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi; industri, inovasi dan infrastruktur; berkurangnya ketimpangan kota dan komunitas berkelanjutan; konsumsi dan produksi; penanganan perubahan iklim; ekosistem laut; ekosistem darat; perdamaian keadilan dan kelembagaan yang tangguh; serta kemitraan. SDG's dibentuk bertujuan untuk menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara seperti mengakhiri kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan menjaga lingkungan. Salah satunya pariwisata yang menjadi salah satu fokus SDG'S yang masuk ke dalam pilar ke 1 (satu) yaitu pengentasan kemiskinan, 8 (delapan) yakni pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi serta 17 (tujuh belas) yaitu kemitraan untuk mencapai tujuan. Dengan adanya pariwisata akan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pencapaian SDGs tersebut (Pristiwasa, 2021). Pariwisata merupakan salah satu sektor industri baru yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan perkembangan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat (Prasodjo, 2017). Pemerintah menjadi pemegang wewenang pertama yang sangat diperlukan untuk pengembangan pariwisata, salah satunya yaitu

dengan mengoptimalkan fungsi administrasi yang dapat mengidentifikasi kebutuhan pengembangan, sekaligus juga kemampuan pelayanan yang baik bagi pengunjung/wisatawan (Prasodjo, 2017). Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Pengelola Desa Wisata Nongkosawit. Jadi, peneliti tertarik meneliti tentang pariwisata karena pariwisata merupakan sektor baru yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan membawa dampak positif maupun negatif secara ekonomis sosial dan budaya serta lingkungan (Zahra Ferlanika, 2015).

*Sustainable development* ini menjadi pedoman bagi *sustainable tourism* dengan menggunakan pendekatan pada prinsip-prinsip *sustainable development*. Dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan sektor pariwisata menjadi sektor yang strategis dan memiliki peran penting dalam pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, perdamaian dan keamanan, menciptakan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, pembangunan, serta telah menyumbang sebanyak US\$ 8,9 Triliun pada 2019 (10,3% terhadap PDB global) yang dapat membuka 330 juta lapangan pekerjaan di seluruh dunia (WTTC 2020). Di samping itu, perkembangan sektor pariwisata di Indonesia juga semakin berkembang pesat dan ditetapkan sebagai *leading sector* karena mampu menjadi media integrasi program lintas sektor dan juga mampu menggerakkan sektor-sektor ekonomi lainnya yang terkait erat. Hal ini menjadikan pariwisata

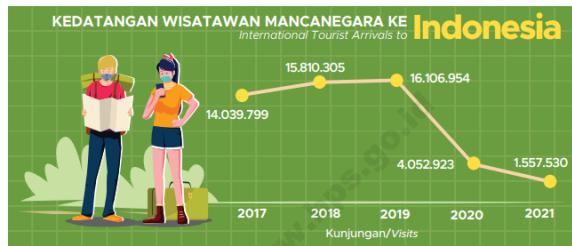
sebagai sektor prioritas unggulan dalam membangun perekonomian di Indonesia dan pengembangan nasional karena menambah pendapatan negara dari para wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman). Kontribusi sektor pariwisata pada Produk Domestik Bruto (PDB) secara konsisten terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini tentang grafik kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB 2017-2022:



Gambar 1.1 Jumlah Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDB 2017-2022

Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2022

Pada tahun 2021 sektor pariwisata ini memiliki kontribusi sebesar 4,3% pada PDB Indonesia yang meningkat 0,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2019 memiliki tingkat kontribusi yang paling tinggi sebesar 4,7%. Selain itu, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2019 menunjukkan pertumbuhan yang positif, sebesar 16,11 juta kunjungan. Namun, dengan adanya covid-19 Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan pembatasan perlintasan bagi orang asing untuk masuk ke Indonesia sehingga berdampak pada penurunan yang sangat tajam terhadap indikator-indikator pariwisata seperti kunjungan wisatawan, tingkat hunian kamar hotel, serta jumlah penumpang jasa angkutan di Indonesia.



Gambar 1.2 Jumlah Wisatawan Mancanegara ke Indonesia  
 Sumber: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2021

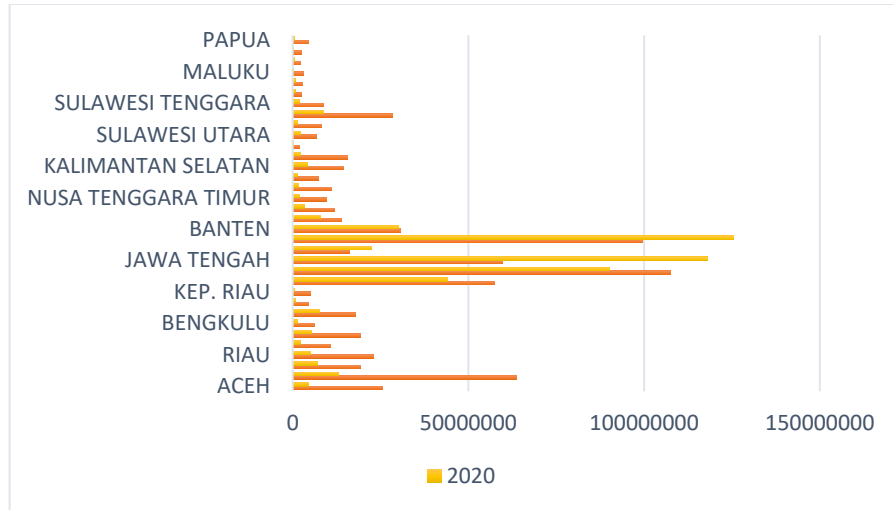
Di sepanjang tahun 2020, tercatat jumlah kunjungan wisman hanya mencapai 4,05 juta kunjungan. Jumlah ini mengalami penurunan hampir 75% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman di tahun 2019. Sedangkan pada tahun 2021 kunjungan wisman juga semakin menurun yang berjumlah 1.557.530 kunjungan. Penurunan kunjungan wisman ke Indonesia yang cukup signifikan pada tahun 2020 dan 2021 ini diakibatkan oleh adanya pemberhentian penerbangan internasional menuju Indonesia.



Gambar 1.3 Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara 2016-2020  
 Sumber: BPS, 2022

Sedangkan jumlah perjalanan wisatawan nusantara mengalami trend peningkatan. Berdasarkan gambar grafik di atas, jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada tahun 2016 sebesar 264,34 juta orang meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai puncaknya pada tahun 2019 sebesar 722,16 juta orang. Namun, akibat pemberlakuan PSBB pada tahun 2020, jumlah perjalanan

wisatawan mengalami penurunan menjadi sebesar Rp518,59 juta atau sebesar 28,19 persen jika dibandingkan dengan jumlah perjalanan wisatawan nusantara di tahun 2019.



Gambar 1.4 Jumlah Wisatawan Indonesia Menurut Kota/Kabupaten

Sumber: BPS, 2020

Walaupun kunjungan wisatawan ke Indonesia mengalami penurunan beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan jumlah pengunjung salah satunya adalah Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan grafik di atas Jawa Tengah merupakan Provinsi yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur sebanyak 118.122.553 wisatawan pada tahun 2020.



Gambar 1.5 Jumlah Wisatawan Mancanegara dan Domestik di Provinsi Jawa Tengah, 2017 – 2021

Sumber: BPS Jawa Tengah 2021

Berdasarkan gambar 1.5 di atas mengenai data jumlah pengunjung wisatawan mancanegara dan domestik di Provinsi di Jawa Tengah, terlihat bahwa jumlah wisatawan mancanegara mengalami fluktuasi dimana jumlah pengunjung yang datang ke Provinsi Jawa Tengah berbeda-beda tiap tahunnya. Jumlah wisman paling rendah yakni pada tahun 2021 sebanyak 1.793 wisatawan dan jumlah pengunjung paling banyak terjadi pada tahun 2019 sebanyak 781.107 wisatawan. Untuk jumlah wisatawan domestik ke Provinsi Jawa Tengah terlihat mengalami penurunan yang cukup signifikan yakni jumlah wisatawan yang berkunjung ke Jawa Tengah pada tahun 2020 sebanyak 22.629.085 wisatawan turun sebesar 5,73% menjadi 21.332.409 wisatawan pada tahun 2021.

Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah komprehensif yang dilakukan oleh negara dalam memberikan kesejahteraan dan kemakmuran secara merata kepada masyarakat Indonesia tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU 23 tahun 2014 terangkum hak-hak khusus yang diberikan oleh negara baik itu bersifat Desentralisasi, Dekonsentrasi maupun tugas pembantuan dalam pelaksanaan pemerintahan dan rumah tangga daerah terkait yang mengedepankan unsur kemandirian. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas yang berlaku dan tugas pembantuan. Menurut Nurhadi Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada daerah bertujuan untuk mempercepat terjadinya perubahan guna mencapai kesejahteraan masyarakat melalui kualitas pelayanan yang juga melibatkan peran serta masyarakat (Prasodjo, 2017).

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendongkrak pendapatan per kapita masyarakat adalah membentuk kampung nelayan, desa mandiri dan desa wisata. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini sudah melakukan pengembangan pariwisata melalui desa wisata yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Di Provinsi Jawa Tengah.

Desa wisata merupakan salah satu program pemerintah yang diharapkan dapat mempercepat kebangkitan pariwisata dan memicu pertumbuhan ekonomi. Konsep desa wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat setempat, agar dapat berperan dalam upaya meningkatkan potensi atau lokasi daya tarik wisata di wilayahnya masing-masing (Kemenparekraf/Baparekraf RI, 2021).

Hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki desa-desa wisata yang sangat berpotensi, salah satunya adalah Kota Semarang. Berdasarkan data dari Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang menjadi kota yang menerima kunjungan wisatawan tertinggi di Jawa Tengah pada tahun 2021 sebanyak 2.670.358 wisatawan dan meraih penghargaan sebagai juara 1 pada sektor Wisata dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif, dan Aman Covid-19 yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung Kemendagri.

Sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/407 tanggal 21 Desember tahun 2012 Pemerintah Kota Semarang menetapkan 3 (tiga) kelurahan yang ada di Kota Semarang menjadi desa wisata yakni Kelurahan Kandri dan Kelurahan Nongkosawit yang ada di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen yang ada di Kelurahan Wonolopo. Sejak penetapan surat

keputusan tersebut sampai saat ini (tahun 2022) Desa Nongkosawit ini belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan bahkan pengembangan pariwisatanya masih tertinggal dengan Desa Wisata Wonolopo dan Desa Wisata Kandri. Dikutip dari dokumen Pokdarwis Pandanaran Kelurahan Kandri pada tahun 2018 Kunjungan wisatawan ke Desa Wisata Kandri sejumlah 12.415 orang, Desa Wisata Wonolopo 5.769 orang sedangkan untuk Desa Wisata Nongkosawit belum melakukan pendataan kunjungan wisatawan dan baru melakukannya pada tahun 2019. Jadi dapat dikatakan bahwa Desa Wisata Nongkosawit ini pengembangannya masih cukup tertinggal dengan desa wisata lainnya.

Tabel 1.1 Perbandingan Jumlah Wisatawan Desa Wisata di Kota Semarang

<b>Tahun</b>	<b>Desa Wisata Kandri</b>	<b>Desa Wisata Wonolopo</b>	<b>Desa Wisata Nongkosawit</b>
2016	6.787	4683	N/A
2017	8.863	5024	N/A
2018	12.415	5769	N/A
2019	12.662	N/A	278
2020	3925	N/A	77
2021	2407	N/A	80
2022	N/A	3.215	16

Sumber: Data diolah pada tahun 2022

Desa Wisata Nongkosawit merupakan salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dengan luas wilayah sebesar 240.756 Ha dan memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh desa lain, seperti makanan khas, kesenian, obyek alam. Selain, memiliki potensi yang unik desa wisata juga harus memiliki fasilitas pendukung, seperti akomodasi atau penginapan, ruang interaksi masyarakat dengan wisatawan, dan fasilitas pendukung lainnya. Akan



tetapi, sejak diresmikan pada tahun 2012 Desa Wisata Nongkosawit hingga saat ini (tahun 2022) belum mengalami perkembangan yang cukup signifikan, yaitu masih banyak potensi-potensi alam yang belum tergali, belum terlihat adanya identitas dan kegiatan desa wisata yang menonjol (Yuliati & Suwandono, 2016). Padahal Desa Wisata Nongkosawit memiliki beragam potensi alam yang dapat dikembangkan seperti agrowisata buah-buahan, wisata ternak dan terasering sawah seperti di Bali. Beragam varian produk desa wisata Nongkosawit memiliki manfaat bagi masyarakatnya di bidang sosial, ekonomi maupun lingkungan mulai dari perkebunan hingga persawahan yang sudah jarang ditemui di Kota Semarang (Edelweis & Sugiri, 2018).

Namun, pengembangan Desa Wisata Nongkosawit saat ini belum dilakukan secara optimal dan usaha pengembangan desa wisata belum memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Desa Wisata Nongkosawit. Padahal dalam beberapa tahun terakhir *sustainable tourism development* ini digunakan sebagai pengembangan pariwisata dan telah menjadi harapan semua pelaku pariwisata di destinasi wisata di dunia (Junaid, 2020). Menurut Kementerian PPN dalam (Susanti et al., 2021) untuk mencapai target SDGs di tahun 2030 diperlukan dukungan dan tanggungjawab dari pemerintah baik pusat maupun daerah dan untuk pelaksanaannya diperlukan modal sosial dan kolaborasi yang efektif antara pemerintah, perguruan tinggi, filantropi dan masyarakat. Peran masyarakat digunakan untuk mempercepat pencapaian target SDGs pada tahun 2030. Walaupun pemerintah sudah mensinergikan pencapaian target SDGs jika tidak adan peran atau dari masyarakat maka usaha tersebut akan sulit tercapai. Oleh karena itu diperlukan kearifan daerah untuk menyikapi pembangunan

secara holistik sehingga terwujud pemerataan dalam kemajuan ekonomi, ekologi, dan keadilan sosial. Dinamika kehidupan bangsa sekarang sangat dipengaruhi oleh kondisi global pengembangan pariwisata, sehingga dituntut mampu menghadapi segala keadaan buruk, seperti dampak politik, krisis ekonomi, dan sebagainya. (Yuningsih et al., 2019).

Dalam *sustainable tourism development* Desa Wisata juga sangat membutuhkan adanya partisipasi seluruh masyarakat setempat. Sastrodipoetro dalam (Ibori, 2013), menyatakan bahwa partisipasi sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang di disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai suatu tujuan tertentu titik dalam pengembangan desa wisata. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit masih sangat rendah dan hanya pada tingkatan *delegated power* atau pemberian kewenangan atau semacam hak veto untuk mengurus dirinya sendiri (Impiansari & S, 2018). Partisipasi masyarakat yang ada hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat di Dusun Randusari saja. Selain itu faktor penghambat secara eksternal dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit adalah belum adanya kemitraan atau kerjasama secara legal (Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, 2022). Jika dilihat dari kondisi di lapangan masih aktivitas wisata juga sangat tertutup karena hanya hanya masyarakat tertentu yang ikut serta dalam kegiatan wisata dan sebagian besar masyarakat Desa Wisata Nongkosawit bahkan tidak mengetahui bahwa Kelurahan Nongkosawit merupakan desa wisata yang telah ditetapkan menjadi wisata Kota Semarang. Masyarakat yang seharusnya menjadi pelaku utama

dalam segala aktivitas wisata serta menjadi penerima manfaat terbesar, dalam hal ini hanya dapat berperan sebagai pengamat saja.

Pengembangan desa wisata tidak hanya membutuhkan partisipasi dari masyarakat lokal, namun juga kerjasama dari *stakeholder* lain seperti pemerintah, swasta, dan perguruan tinggi serta media massa. Dalam rangka pengembangan pariwisata, diperlukan integrasi peran antara pemerintah dan komunitas lokal. Tidak jarang ditemukan konflik antar *stakeholder* dalam pengembangan aktivitas pariwisata. Ini dikarenakan aktivitas wisata akan berdampak pada partisipasi dan kesejahteraan masyarakat lokal, budaya, dan keberlanjutan lingkungan sejalan dengan jumlah wisatawan yang akan berkunjung (Chang, *et al.*, 2012). Beberapa permasalahan lain juga terkait dengan luputnya kolaborasi berbagai aktor dengan partisipasi masyarakat dan kurangnya peraturan pemerintah (Choi & Sirakaya, 2006). Untuk itu, perlu dipahami peran masing-masing aktor dalam pengembangan pariwisata. Pelaksanaan hubungan antar pemangku kepentingan harus jelas dan terarah, baik peran maupun tanggung jawab masing-masing pihak (Purba *et al.*, 2021). *Stakeholders* menjadi peran yang sangat penting dalam pengembangan pariwisata yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat (Handayani & Warsono, 2017). Peran *stakeholder* merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit yakni adanya perbedaan pemahaman tentang desa wisata antar anggota kelompok sadar wisata sehingga menimbulkan kecemburuan dan mengurangi kekompakan antar anggota. POKDARWIS juga tidak melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang menyangkut pengembangan Desa Wisata Nongkosawit dan kurang membimbing masyarakat sekitar. Peran pemerintah di Desa Wisata Nongkosawit masih belum

maksimal. Selain itu, belum ada peran dari sektor swasta yang mendukung pariwisata dan memiliki kepentingan dalam pengembangan pariwisata (Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, 2022).

Dari permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan adanya interaksi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat seperti yang sering dipaparkan dalam *good governance*. Menurut Dwiyanto (2018: 62), pendekatan *governance* mendorong terbentuknya kolaborasi antara *stakeholder* pemerintah dengan masyarakat untuk memecahkan masalah dan kebutuhan publik. Masyarakat juga berperan aktif dalam pengelolaan pariwisata yakni menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, sedangkan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja. *Helix* pemerintah, industri, dan perguruan tinggi saling berinteraksi dalam hubungan timbal balik untuk meningkatkan kinerja *helix* yang lain (Sumarto, 2021).

Menurut Gibson dalam (Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, 2022), bentuk kemitraan dan kerjasama ini harus melibatkan penduduk local, organisasi masyarakat, sektor publik maupun sektor swasta. Manfaat dari kemitraan dan kerjasama sendiri adalah mencegah terjadinya konflik antar *stakeholders*. Namun menurut Ansell & Gash dalam (Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, 2022) proses kolaborasi biasanya terdapat persaingan antara kolaborator dengan pihak lain, enggan ikut berpartisipasi sepenuhnya karena kesibukan, tidak yakin dengan hasil, atau kekhawatiran akan penolakan dari pendapat. Dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit, masih belum adanya bentuk kemitraan dan kerjasama dengan pihak swasta.

Desa Wisata Nongkosawit menjadi desa yang memiliki perkembangan lambat. Mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, amenities yang belum memadai dan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Kandang Gunung sebagai pengelola Desa Wisata Nongkosawit hanya memiliki 9 anggota. Sebagian besar pengelola Desa Wisata Nongkosawit adalah orang tua sehingga kurang pengetahuan tentang teknologi informasi, cara mengemas dan memasarkan produk Desa Wisata Nongkosawit. Pengelola Desa Wisata Nongkosawit selama ini hanya mengandalkan agen-agen pariwisata untuk menarik minat masyarakat agar berpariwisata di Desa Nongkosawit. Sehingga dalam pengelolaan pariwisata ini perlu adanya manajemen perubahan yang digunakan sebagai pedoman bagi organisasi untuk menangani masalah saat ini sampai mencapai tujuan organisasi sesuai yang diharapkan (Kismartini et al., 2021). Walaupun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menerbitkan Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2020 mengenai mekanisme pemberian bantuan keuangan sebesar 1 miliar kepada setiap desa wisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sesuai dengan kondisi dan potensi desa baik desa wisata di Kota maupun Kabupaten. Tetapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang mulai menghentikan anggaran untuk seluruh Desa Wisata mulai dari tahun 2018 (Pamungkas & Priyadi, 2018).

Dapat dilihat bahwa pengembangan sektor pariwisata, khususnya desa wisata sangatlah berperan penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui potensi dan pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan desa wisata disuatu daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam lagi

bagaimana pengembangan desa wisata yang berbasis *sustainable tourism development* dan mengidentifikasi *stakeholder* yang berperan di Desa Nongkosawit yang direncanakan sebagai pengembangan permukiman, agroindustri, rekreasi, perdagangan dan jasa serta area lindung sesuai arahan pengembangan BWK VIII.

Mengingat kompleksnya permasalahan dalam pengembangan pariwisata terutama *sustainable tourism development* desa wisata ini melatar belakangi penelitian. Hal ini disebabkan karena *sustainable tourism development* digunakan sebagai pedoman pengembangan pariwisata dan untuk mencapai target SDGs diperlukan peran *stakeholder* dalam pengembangan desa wisata serta kolaborasi yang efektif antara Pemerintah, Perguruan Tinggi, Filantropi dan masyarakat. Selain itu *sustainable tourism development* dipandang sebagai alternatif meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Maka dari itu penelitian ini penting dilakukan dalam rangka untuk mengetahui, meneliti, mengkaji serta mengatasi permasalahan kepariwisataan yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengembangan pariwisata di Desa Nongkosawit. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah **“Mengapa *Sustainable Tourism Development* Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum maksimal?”**.

## **1.2.Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berbasis *Sustainable Tourism Development*?
2. Siapa saja *stakeholder* yang terlibat dalam *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
3. Apa faktor pendukung dan faktor penghambat *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?
4. Bagaimana model *helix* dalam *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dari diadakannya penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang berbasis *Sustainable Tourism Development*
2. Mengidentifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
3. Menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
4. Mendeskripsikan model *helix* dalam *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis, praktis dan akademis sehingga penelitian yang telah dilakukan tidak akan sia-sia.

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki fungsi untuk memberikan wawasan pengetahuan dan menjadi bahan literatur atau landasan pengetahuan untuk penelitian berikutnya tentang *Sustainable Tourism Development* desa wisata.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini disusun untuk memberikan sumbangan gagasan, ide-ide baru dan informasi kepada pemerintah yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan.

###### b. Bagi Masyarakat

Penulisan penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat untuk mendapat informasi tentang *Sustainable Tourism Development* desa wisata.

###### c. Bagi Peneliti

Mengasah atau mempraktekkan ilmu yang didapat dari mata kuliah yang telah didapatkan dibangku kuliah

##### 3. Manfaat akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi atau referensi untuk melakukan peneliti berikutnya yang tertarik meneliti tentang *Sustainable Tourism Development* Desa Wisata.



## **1.5.Kerangka Teoritis**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian tentang *Sustainable Tourism Development* di Desa Nongkosawit tidak lepas dengan mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan. Penelitian terdahulu bertujuan untuk menemukan bahan yang sebanding, selain itu juga untuk meringankan peneliti menemukan dan membuktikan keaslian penelitian tersebut.

Bagian ini merupakan bagian dimana peneliti memuat bermacam-macam temuan pada penelitian terdahulu terkait penelitian yang akan dilakukan, kemudian menyusunnya dalam bentuk paragraf dan tabel abstrak yang dapat dipilih dari penelitian yang dipublikasikan (jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lainnya). Berikut ini beberapa penjelasan penelitian terdahulu dan tabel penelitian terdahulu terlampir di belakang skripsi:

Restyani Ayu Putri, dkk (2019) dalam artikelnya membahas perencanaan pembangunan desa wisata dengan menggunakan pendekatan bottom up planning dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Rakorbang Kota dan Rakorbang Provinsi. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan survei, serta publikasi dari data sekunder. Hasil penelitian ini adalah Pelaksanaan perencanaan pembangunan (*bottom-up planning*) Desa Wisata Nongkosawit di tingkat Musrenbang Kelurahan Nongkosawit menghasilkan 7 (tujuh) usulan yaitu rehab kantor kelurahan, pengerasan sayap jalan, pengaspalan jalan, pavingisasi, perbaikan saluran air, pelatihan membatik dan pelatihan pemandu wisata (Putri et al., 2013).

Selanjutnya ada penelitian mengenai *tourism development*. Penelitian ini dilakukan oleh Bagus Sudibya (2018). Menurut Hadiwijoyo dalam (Sudibya, 2018) pengembangan desa wisata memiliki beberapa kriteria aksesibilitas (jenis alat transportasi), objek wisata yang menarik (alam, seni budaya, legenda, dan makanan lokal), keamanan di desa terjamin, tersedia akomodasi, telekomunikasi, dan tenaga kerja yang memadai, beriklim sejuk atau dingin, memiliki hubungan dengan objek wisata lain yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Selain itu dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pengembangan konsep pembangunan pariwisata berbasis masyarakat adalah pawongan (masyarakat lokal), palemahan (pariwisata ramah lingkungan atau *ecotourism*), dan parahyangan (sosialisasi mengenai ajaran agama hindu untuk membangun dan memperbaiki pura-pura, dan mengadakan upacara-upacara keagamaan yang berupa: piodalan, pecaruan, ngenteg linggih, dan lainnya yang disesuaikan dengan hari baik).

Kemudian dalam penelitian Ilham Junaid, dkk (2020) yang mengatakan bahwa dalam implementasi pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) terdiri dari 3 (tiga) aspek yakni ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. *Sustainable tourism* merupakan penjabaran dari pendekatan *sustainable development* (Ruhanen, 2013). *Sustainable development* merupakan hasil kesepakatan bersama akademisi dunia yang menekankan bahwa kebutuhan (*needs*) generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang. Dalam implementasi pengembangan berkelanjutan dibutuhkan perhatian dari pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk meminimalkan dampak negatif dari aktifitas pariwisata seperti peran dari

berbagai kelompok masyarakat dan peran pemerintah setempat khususnya Dinas Pariwisata untuk memberikan sosialisasi atau pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat setempat tentang makna dan arti penting pariwisata berkelanjutan. Kemudian pemerintah juga diharapkan sebagai pembuat kebijakan (*policy maker*) untuk mengatur dan mengatasi permasalahan. Pemerintah juga mempunyai peran untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian lingkungan dan sosial budaya bagi masyarakatnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif (Junaid, 2020).

Setelah penelitian perencanaan dan pengembangan desa wisata Nongkosawit di atas penelitian selanjutnya yang ditulis oleh Putri Andriana dan Apik Budi Santoso (2021) berkaitan dengan perilaku masyarakat melalui Program Sapta Pesona untuk mendorong kesadaran masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa atraksi wisata dari tiga indikator syarat destinasi wisata di Desa Wisata Nongkosawit telah terpenuhi. Tiga indikator syarat destinasi meliputi unsur *something to see* berupa pemandangan persawahan, *something to do*, *something to buy*. Perilaku masyarakat dalam menunjang program Sapta Pesona yang dihitung menggunakan statistik deskriptif termasuk kriteria baik dengan skor 110,5 (Andriana & Santoso, 2020).

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian yang ditulis oleh Yohana Amalia Impansari dan Endang Larasi S (2018) ini berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Dalam pengembangan desa wisata skema tingkatan partisipasi masyarakat yang

digunakan dalam memutuskan kebijakan, di antaranya adalah kontrol warga negara (*citizen control*), delegasi kewenangan (*delegate power*), dan kemitraan (*partnership*). Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang memiliki bentuk partisipasi masyarakat *Pseudo participation* atau partisipasi semu. Hal ini berdasarkan tidak terpenuhinya 2 dari 3 kriteria *Authentic Participation* atau partisipasi otentik. Selain itu terdapat faktor pendorong maupun pendukung yakni faktor pendorong adalah Jenis kelamin, latar belakang pendidikan, kepercayaan terhadap budaya tertentu. Faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat Nongkosawit adalah pekerjaan masyarakat, pengetahuan masyarakat terhadap program, kepercayaan terhadap budaya tertentu dan faktor eksternal (Impiansari & S, 2018).

Penelitian selanjutnya membahas tentang model *pentahelix* dalam pengembangan pariwisata melalui kolaborasi lima unsur *stakeholder* yaitu Akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media yang ditulis oleh Tri Yuningsih, dkk (2019). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengembangan pariwisata kota Semarang menggunakan model *pentahelix*, sudah melibatkan akademisi, pemerintah, komunitas, bisnis, dan media massa. Temuan lapangan adalah Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang (BP2KS) belum optimal. Kerjasama antar aktor model *pentahelix* yang ada di kota Semarang dari hasil penelitian belum optimal. Perlunya penguatan kapasitas kelembagaan BP2KS (Yuningsih et al., 2019).

Sama halnya dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian yang ditulis oleh Eko Priyo Purnomo (2021) berkaitan dengan pariwisata dengan menggunakan pendekatan *pentahelix* sebagai strategi pemulihan pariwisata akibat Covid-19. Kolaborasi pada model *pentahelix* ini sebagai kelanjutan dari strategi *triple-helix* dan *quadruplehelix* dengan melibatkan berbagai elemen dan sektor masyarakat untuk mewujudkan inovasi. Penelitian ini menggunakan kualitatif eksploratif. Hasil dari penelitian ini adalah Covid-19 berdampak destruktif terhadap sektor pariwisata di Provinsi Bali yaitu rendahnya kunjungan wisatawan, penginapan, dan pemutusan hubungan karyawan (PHK). Adanya kerjasama aktor *pentahelix* digunakan untuk merespon, mempertahankan, memberikan inovasi dan nilai-nilai berkelanjutan bagi pariwisata Bali sehingga sektor pariwisata perlahan dapat dibuka kembali untuk umum serta kedepannya kolaborasi model *pentahelix* dapat ditingkatkan sehingga sektor pariwisata dapat lebih kokoh dari tekanan dan bencana alam/non alam (Purnomo et al., 2021).

Sedangkan penelitian berikutnya membahas kolaborasi *pentahelix* Untuk Pengembangan Desa Wisata Berbasis Green tourism yang ditulis oleh Wayan Pugra, dkk (2021). Menggunakan metode *mix method* atau kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi aktor *pentahelix* berperan penting dalam menentukan keberhasilan pengembangan desa ini menuju desa wisata berbasis green melalui sinergi harmonis antar aktor *pentahelix* dalam mendukung kegiatan pembangunan di desa, seperti: gotong-royong dalam menjaga kebersihan lingkungan, membuat jalur *tracking*,

pembentukan pondok edukasi, maupun dalam pembentukan wadah pelestarian budaya (Pugra et al., 2021).

Penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian yang sebelumnya penelitian ini menganalisis tentang model *pentahelix* dan *sustainable tourism development* yang disusun oleh Siti Fatimah dan Jefri Naldi tahun 2019. kondensasi data, tuas data dan penarikan. Validasi data menggunakan triangulasi sumber. Dari penelitian tersebut ditemukan bahwa Pengembangan pariwisata di kota Bukittinggi menggunakan model pendekatan *pentahelix* telah melibatkan Pemerintah Kota Bukittinggi, Akademisi dan Praktisi Pariwisata, Komunitas dan Komunitas, Pelaku Usaha, dan Media. Kemudian temuan dari lapangan juga menunjukkan bahwa peran dan tugas pemangku kepentingan tidak optimal serta Kolaborasi antar pemangku kepentingan di Kota Bukittinggi dari hasil penelitian tidak sinergis (Jefri Naldi, 2019).

Dari beberapa penelitian terdahulu yang sudah dideskripsikan di atas perbedaan penelitian ini adalah peneliti tidak hanya meneliti *sustainable tourism development* saja melainkan juga menganalisis model *helix* dan identifikasi aktor yang terlibat dalam *sustainable tourism development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang yang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya.

## **1.5.2 Kajian Pustaka**

### **1.5.2.1 Administrasi Publik**

Menurut Chandler dan Planodalam (Kamaruddin, 2016) administrasi publik merupakan suatu proses mengorganisir dan mengkoordinasikan yang

dilakukan oleh sumber daya (*personal publik*) untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola (*manage*) keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu Henry dalam (Pasolong, 2016) juga menyatakan bahwa administrasi publik ini merupakan sebuah perpaduan yang kompleks antara teori dan praktik dengan tujuan untuk mengenalkan pemahaman dan informasi pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang dipimpin dan mendorong kebijakan publik yang dibuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Keban (2008) menambahkan bahwa kegiatan administrasi publik menyangkut pemberian pelayanan di berbagai bidang kehidupan (*public services*) masyarakat, maupun berkenaan dengan mengejar ketertinggalan masyarakat melalui program-program pembangunan. Adapun peran administrasi publik yakni membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi (Keban, 2008).

Berdasarkan definisi teori di atas dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses manajemen keputusan-keputusan dalam kebijakan publik dan memberikan pelayanan untuk membantu memberdayakan masyarakat dan menciptakan demokrasi. Administrasi publik menunjukkan bagaimana peran pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa yang penting atau baik untuk masyarakat.

### 1.5.2.2 Paradigma Administrasi Publik

Seiring berjalannya waktu paradigma administrasi publik sering mengalami pergeseran dimulai dari era “*administration dichotomy*” sampai dengan era “*governance*” hingga sampai akhirnya menciptakan konsep “*collaborative governance*”. Khun dalam (Pasolong 2016) menyatakan bahwa paradigma merupakan suatu cara pandang, nilai-nilai, metode-metode, prinsip dasar, atau juga sebagai cara menemukan solusi suatu permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Nicholas Henry (2007) sejak tahun 1975 paradigma administrasi publik beberapa kali direvisi yang awalnya menyatakan ada empat perkembangan paradigma menjadi enam perkembangan paradigma administrasi publik. Berikut ini merupakan pergeseran paradigma menurut Nicholas Henry dalam (Thoha, 2014) yakni:

1. *The Politics - Administration Dichotomy*, (1900 – 1926);

Pemerintah memiliki dua fungsi pokok yang berbeda, yaitu fungsi politik yang berisi tentang tugas pemerintah dalam membuat kebijakan atau melahirkan keinginan-keinginan negara, sementara fungsi administrasi berisi tentang pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan tersebut. dan fungsi politik. Pemisahan ini jelas membedakan antara politik dan administrasi. Penekanan paradigma ini adalah pada *locus*-nya yakni dimana seharusnya administrasi negara berada.

2. *The Principles of Administration*, (1927 – 1937);

Paradigma ini berisi bahwa fokus lebih penting daripada *locus*. Prinsip-prinsip administrasi Negara memberikan indikasi dari perkembangan ini sekaligus membuktikan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat dipelajari



pada semua tatanan administrasi tanpa mempedulikan fungsi, lingkungan, misi atau kerangka institusi. Prinsip-prinsip administrasi yang paling terkenal dari Gullick dan Urwick adalah singkatan POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, Budgeting*).

3. *Public Administration as Political Science, (1950 – 1970);*

Paradigma ini merupakan usaha untuk menetapkan kembali hubungan antara administrasi negara dengan ilmu politik. Penekanan pada paradigma ini pada *locus* yakni birokrasi pemerintahan, dan focus pada wilayah kepentingan. Dengan demikian dari paradigma ini dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik harus dibangun agar dapat memberi perhatian kepada pelayanan masyarakat sebagai warga negara bukan sebagai pelanggan, mengutamakan kepentingan umum, mengikutsertakan warga masyarakat, berpikir strategis dan bertindak demokratis, memperhatikan norma, nilai, dan standard yang ada serta menghargai masyarakat.

4. *Public Administration as Management, (1956 – 1970);*

Dalam paradigma ini merupakan prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer. Paradigma ini merupakan manajemen menyediakan teknik-teknik yang membutuhkan keahlian dan spesialisasi, tetapi dalam setting kelembagaan apa keahlian itu harus diterapkan, tidak diidentifikasi. Paradigma ini berfokus pada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung oleh psikologi sosial dan pada kebijakan publik. Semua

fokus yang dikembangkan diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia administrasi karena itu lokus menjadi tidak jelas.

5. *Public Administration as Public Administration, (1970 – sekarang);*

Paradigma ini mengukuhkan diri bahwa administrasi publik merupakan disiplin ilmu mandiri yang memiliki teori, istilah, objek dan metode sendiri. Administrasi publik merambah perhatiannya pada ilmu kebijaksanaan, politik ekonomi, proses pembuatan kebijakan dan analisisnya serta cara mengukurnya. Aspek perhatian paradigma ini menghubungkan mata rantai antara *focus* administrasi publik dengan *locus*-nya. Dimana fokusnya adalah teori organisasi, praktek analisis kebijakan publik, teknik-teknik administrasi dan manajemen. Sedangkan *locus* normatifnya ada pada birokrasi pemerintahan dan persoalan-persoalan masyarakat (public affairs)

6. *Governance, (1990 – sekarang).*

Paradigma yang terakhir adalah “*governance*”. *Governance* didefinisikan sebagai pelaksanaan kekuasaan atau otoritas oleh pemimpin politik untuk kesejahteraan warga negara, memiliki proses yang kompleks di mana beberapa sektor masyarakat memegang kekuasaan, memberlakukan dan menyebarluaskan kebijakan publik yang secara langsung berpengaruh kepada masyarakat dan lembaga serta berpengaruh pula pada pembangunan ekonomi dan sosial (Tamayao, 2014).

Pada paradigma ini merupakan paradigma terakhir dan berhubungan dengan pemerintahan. Paradigma ini dimulai pada tahun 1990-an, selama paradigma ini perubahan persepsi pemerintah dan

administrasi yang terjadi perubahan paradigma ini dicatat dalam 3 klasifikasi:

a. Globalisasi.

Globalisasi melibatkan penggabungan perubahan multinasional internet, isu-isu lingkungan di seluruh dunia dan perdagangan internasional.

b. Redefinisi

Redefinisi melibatkan proses yang sebenarnya dari pemerintah untuk mendefinisikan kembali posisi pemerintah. Pemerintah bergerak dari kekuasaan dan hierarki menuju kolaborasi dan kemitraan.

c. Devolusi

Devolusi termasuk partisipasi warga negara, kelompok warga, kemitraan swasta publik, sektor nirlaba, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintahan dan pemerintahan lainnya.

Selama paradigma ini administrasi publik beralih dari mengendalikan warga, upaya menyediakan kebijakan publik, hukum, organisasi dan Lembaga yang dikendalikan oleh warga. Perbedaan kelembagaan antara pemerintah, masyarakat, swasta, dan sektor nirlaba mulai dari kabur sedang merestrukturisasi organisasi dengan penggunaan teknologi informasi.

Selain itu menurut Utomo (2008: 184), di dalam pemerintahan yang governance, maka terjadilah atau dituntut adanya sinergi antara ketiga aktor yang ada yaitu pemerintah itu sendiri (*public*), masyarakat (*community*) atau *civil society* (masyarakat madani) dan pihak swasta (*private*). Ditambahkan

Utomo (2008: 185) bagaimana ke 3 aktor yang ada yaitu *public*, *private* dan *community* mendudukan dirinya sesuai dengan kapasitas dan lingkupnya masing-masing, melakukan sinergi dalam rangka mencapai tujuan negara dan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan teori di atas menunjukkan bahwa penelitian ini termasuk ke dalam paradigma keenam yaitu *governance*. Dapat diartikan bahwa dalam *governance*, pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengelola tata pemerintahan termasuk dalam hal penyelenggaraan layanan publik dan hubungan antar *stakeholder* untuk memenuhi kebutuhan publik. *Governance* ini membutuhkan partisipasi warga negara, kelompok warga, kemitraan swasta publik, sektor nirlaba, sektor swasta, otoritas publik, asosiasi pemerintahan dan pemerintahan lainnya. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat, maka tata kelola pemerintah akan mampu dijalankan dengan baik dan mampu mendekatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

### **1.5.2.3 Manajemen Publik**

Ott, Hyde & Shafritz, 1990 dalam Keban (2004) berpendapat bahwa manajemen Publik merupakan Bagian dari administrasi publik yang berfokus pada rancangan program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, evaluasi program dan audit. Manajemen publik ini juga berfokus pada internal organisasi sektor publik yang mengatur segala aktivitas organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi. Selain

itu manajemen publik merupakan suatu kegiatan yang memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dan sangat bergantung pada situasi dan kondisi dimana beroperasi.

Paradigma Manajemen Publik mengalami pergeseran sesuai dengan perkembangan zaman yang berawal dari paradigma *Old Public Administration* (OPA) berkembang menjadi paradigma *New Public Management* (NPM), kemudian *government* dan akhirnya menjadi paradigma *governance*. Adanya pergeseran paradigma menyebabkan lahirnya istilah baru yaitu kolaborasi antar *stakeholders*. Selain pemerintah kolaborasi ini melibatkan kelompok-kelompok kepentingan masyarakat atau *Non-Governmental Organization* (NGO) dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah yang ada di publik (Tilano & Suwitri, 2019).

Terkait dengan paparan *governance* sebagai *networks* dalam hubungannya dengan kemitraan, Loffler dan Bovaird (2009: 165) berpendapat bahwa terdapat beberapa makna dari *governance*. Pertama, cara para *stakeholder* berinteraksi satu dengan lainnya untuk mempengaruhi hasil kebijakan. Kedua, pola atau struktur yang muncul dalam sistem sosial politik sebagai hasil bersama atau keluaran dari upaya intervensi-interaksi seluruh aktor. Ketiga, koordinasi secara formal dan informal antara publik dan *privat*. Keempat, konsep atau teori yang mencerminkan koordinasi suatu sistem sosial dengan peran negara di dalamnya. Loffer dan Bovaird (2009: 164) juga mengemukakan bahwa elemen terpenting dalam *governance* berkaitan dengan skenario berbagai *stakeholder* ketika problem kolektif tak dapat

dipecahkan hanya oleh otoritas publik. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama *stakeholder* lain (warga masyarakat, dunia usaha, LSM) dengan cara mediasi, arbitrase dan *self regulation* yang lebih efektif daripada tindakan langsung pemerintah.

Jadi, dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen publik mengacu pada serangkaian aksi yang dicoba ataupun tidak dicoba oleh pemerintah dan berfokus pada internal organisasi sektor publik yang mengatur segala aktivitas organisasi sektor publik ini bekerja dengan optimal untuk tujuan tertentu dalam rangka mengentaskan permasalahan publik maupun untuk kepentingan universal.

#### **1.5.2.4 Pariwisata**

Menurut etimologi kata “pariwisata” diidentikan dengan kata “*tourist*” yang menurut Yoeti (1996) pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan seseorang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kemudian E. Guyer Freuler dalam Oka A. Yoeti. 1996, juga mengatakan bahwa pariwisata merupakan suatu aktivitas yang didasarkan atas kebutuhan hidup seperti kebutuhan kesehatan, pergantian hawa, penilaian yang sadar dan menumbuhkan kecintaan yang disebabkan oleh pergaulan berbagai bangsa dan kelas masyarakat.

Sedangkan Menurut Suwanto (Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja 2017: 21) pariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk menghasilkan uang. Dalam UU No 10 Tahun

2009 tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah. Sedangkan kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. Pariwisata sudah menjadi bagian yang melekat atau tidak terpisahkan dari perkembangan suatu negara. Bahkan suatu negara menjadi lebih dikenal oleh publik di negara lain karena daya tarik wisata dari destinasi wisata yang ada di negara tersebut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya diluar tempat tinggalnya, karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan uang.

Menurut Suwena dan Widyatmaja (2017) berikut ini merupakan ciri atau kriteria perjalanan pariwisata yakni:

- a. Perjalanan itu dilakukan untuk sementara waktu
- b. Perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain
- c. Perjalanan itu; walaupun apapun bentuknya, harus selalu dikaitkan dengan pertamasyaan atau rekreasi
- d. Orang yang melakukan perjalanan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.

Selain itu, Suwena dan Widyatmaja (2017) juga menyebutkan bahwa terdapat berbagai macam jenis pariwisata antara lain:

a. Menurut letak geografis, dimana kegiatan pariwisata berkembang dibedakan menjadi:

- 1) Pariwisata lokal (*local tourism*) merupakan pariwisata yang memiliki ruang lingkup lebih sempit dan terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja, seperti kepariwisataan kota Denpasar dan kepariwisataan kota Bandung.
- 2) Pariwisata regional (*regional tourism*) merupakan kegiatan pariwisata yang dikembangkan dalam suatu wilayah tertentu, dapat regional dalam lingkungan nasional dan dapat pula regional dalam ruang lingkup internasional, seperti kepariwisataan Bali, Yogyakarta, dan lain-lain.
- 3) Pariwisata nasional (*national tourism*) yaitu jenis pariwisata yang dikembangkan dalam wilayah suatu negara, dimana para pesertanya tidak saja terdiri dari warga negaranya sendiri tetapi juga orang asing yang berdiam di negara tersebut. Misalnya kepariwisataan yang ada di daerah-daerah dalam satu wilayah Indonesia.
- 4) Pariwisata regional-internasional yaitu kegiatan kepariwisataan yang berkembang di suatu wilayah internasional yang terbatas, tetapi melewati batas-batas lebih dari dua atau tiga negara dalam wilayah tersebut. Misalnya kepariwisataan ASEAN.



5) Pariwisata internasional (*International tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang terdapat atau dikembangkan di banyak negara di dunia.

b. Menurut pengaruhnya terhadap neraca pembayaran

1) Pariwisata aktif (*in bound tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala masuknya wisatawan asing ke suatu negara tertentu. Hal ini tentu akan mendapatkan masukan devisa bagi negara yang dikunjungi dengan sendirinya akan memperkuat posisi neraca pembayaran negara yang dikunjungi wisatawan.

2) Pariwisata pasif (*outgoing tourism*) yaitu kegiatan kepariwisataan yang ditandai dengan gejala keluarnya warga negara sendiri bepergian ke luar negeri sebagai wisatawan. Karena ditinjau dari segi pemasukan devisa negara, kegiatan ini merugikan negara asal wisatawan, karena uang yang dibelanjakan itu terjadi di luar negeri

c. Menurut Objeknya

1) *Cultural tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan disebabkan karena adanya daya tarik dari seni dan budaya suatu tempat atau daerah.

2) *Recuperational tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk menyembuhkan penyakit, seperti mandi di sumber air panas, mandi lumpur, dan lain-lain.

- 3) *Commercial tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan dikaitkan dengan kegiatan perdagangan nasional dan internasional.
- 4) *Sport tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan adalah untuk melihat atau menyaksikan suatu pesta olahraga di suatu tempat atau negara tertentu.
- 5) *Political tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kegiatan suatu negara. Misalnya menyaksikan peringatan hari kemerdekaan suatu negara
- 6) *Social tourism* yaitu jenis pariwisata dimana dari segi penyelenggaraannya tidak menekankan untuk mencari keuntungan, misalnya study tour, picnic, dan lain-lain.
- 7) *Religion tourism* yaitu jenis pariwisata dimana motivasi wisatawan untuk melakukan perjalanan tujuannya melihat atau menyaksikan upacara-upacara keagamaan, seperti upacara Bali Krama di Besakih, haji umroh bagi agama Islam, dan lain-lain.
- 8) *Marine tourism* merupakan kegiatan wisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, makan dan minum.

Berdasarkan jenis pariwisata maka Desa Wisata Nongkosawit dapat dikategorikan sebagai berikut *pertama*, berdasarkan letak geografis

dapat dikategorikan pariwisata lokal (*local tourism*) karena ruang lingkup yang sempit dan terbatas. *Kedua*, bila didasarkan pada neraca pembayaran dikategorikan pariwisata aktif (*in bound tourism*) karena menambah kontribusi devisa negara. Ketiga jika dilihat dari objek pariwisata dikategorikan *cultural tourism* dan *religion tourism* karena di Desa Wisata Nongkosawit memiliki daya tarik wisata seni budaya seperti tari kunthulan dan wayang ringut serta tradisi kirab pusaka Kyai Bende yang sarat akan budaya dan religi.

#### **1.5.2.5 Pengembangan Pariwisata**

Menurut Pebriyanti (2020) dalam (Annatasya Yunita Nugroho, Amni Zarkasyi Rahman, 2022) pengembangan pariwisata merupakan tahapan dalam langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan seta tujuan pembangunan. Sedangkan Paturusi (2001) berpendapat bahwa pengembangan merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek dan daya tarik wisata sehingga dapat dikunjungi wisatawan dan mampu memberi manfaat bagi masyarakat sekitar daya tarik wisata maupun bagi pemerintah. Menurut Gamal Suwanto (2004) pengembangan pariwisata sering dikaitkan dengan Sapta Pengembangan Kebijakan oleh pemerintah yaitu: Promosi, aksesibilitas, kawasan pariwisata, wisata bahari, produk wisata, sumber daya manusia dan kampanye nasional sadar wisata. Pengembangan pariwisata dalam penelitian ini adalah meningkatkan dan

mengembangkan potensi yang dimiliki Desa Wisata Nongkosawit yang mencakup SDM, produk wisata, promosi dan kampanye sadar wisata.

Menurut Oka A. Yoeti (2002) mengartikan pengembangan pariwisata sebagai usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana guna memperbaiki produk yang sedang berjalan atau menambah jenis produk yang dihasilkan ataupun yang dipasarkan. Sedangkan menurut Soetomo (2001) dalam (Suwarti, 2017) dikatakan bahwa pengembangan pariwisata adalah suatu proses dinamis menatap masa depan untuk menjawab tantangan kemampuan dunia pariwisata.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka pengembangan pariwisata adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek/daya tarik wisata yang memberi kemanfaatan.

Lebih lanjut Yoeti (2022) menyebutkan bahwa untuk menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata, maka perlu memperhatikan lima aspek sebagai berikut:

- a. *Traveler* (turis)
- b. *Transportation* (transport)
- c. *Attraction* (Atraksi)
- d. Fasilitas Pelayanan
- e. Informasi dan promosi

Menurut UU nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, daerah tujuan wisata adalah kawasan geografis yang spesifik berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang didalamnya terdapat kegiatan

kepariwisataan dan dilengkapi dengan ketersediaan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait. Cooper dkk (1997) mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) komponen yang harus dimiliki oleh sebuah destinasi wisata untuk pengembangan potensi kepariwisataan, yaitu: Berikut ini hal-hal yang terdapat dalam pengembangan pariwisata menurut Yoeti (2002) yakni:

- a. *Atraksi*: suatu yang dapat dilihat atau di saksikan melalui suatu pertunjukan atau *show* yang khusus diselenggarakan untuk para wisatawan. Atraksi dibagi menjadi tiga yaitu wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan.
- b. *Aktivitas*: aktivitas yang mengarahkan pada kepentingan pergerakan kehidupan kawasan, kegembiraan atau kesenangan.
- c. *Aksesibilitas*: sarana yang akan memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan berkunjung dengan transportasi dan jalan yang akan menuju daerah tujuan wisata.
- d. *Amenitas*: yakni penunjang fisik yang diciptakan oleh pelaku wisata.

Menurut Pearce dalam (Suwarti, 2017) mengembangkan potensi pariwisata ada beberapa factor yang perlu diperhatikan, yakni:

1. Iklim

Pengembangan potensi kepariwisataan iklim berpengaruh terhadap:

- a. Sebagai penentu daya tarik wisata
- b. Iklim berpengaruh terhadap kegiatan pariwisata
- c. Iklim dapat berpengaruh atas bentuk bangunan

2. Kondisi fisik

- a. Tempat dan ruang yang cukup serta memadai untuk pembangunan gedung-gedung dan jasa infrastruktur.
  - b. Kemudahan dijangkau sehingga dapat meningkatkan daya tarik dan juga menghindari biaya besar dalam pembangunan tempat rekreasi.
3. Daya tarik
  4. Akses
  5. Sewa dan tata guna lahan
  6. Faktor- faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Unsur-unsur pengembangan Pariwisata:
    - a. Manusia, merupakan pelaku utama dari kegiatan pariwisata itu sendiri
    - b. Tempat, merupakan unsur fisik yang sebenarnya tercakup kegiatan pariwisata kegiatan
    - c. Waktu, merupakan unsur tempo atau jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan perjalanan pariwisata dan selama berdiam di tempat tujuan.

Dalam penelitian ini pengembangan pariwisata akan dilihat dari 4 (empat) aspek dalam pengembangan pariwisata yakni atraksi, aktivitas, aksesibilitas, dan amenitas.

#### ***1.5.2.6 Sustainable Tourism Development***

Sebelum membahas mengenai *sustainable tourism development* terlebih dahulu peneliti akan membahas tentang *sustainable development*. Pada saat ini masalah *sustainable development* telah menjadi isu penting yang harus terus disosialisasikan di tengah masyarakat sehingga masyarakat maupun

negara dapat bersaing dan berkembang mengikuti perkembangan zaman. *Sustainable development* merupakan sebuah upaya pembangunan suatu negara yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan bahkan budaya untuk kebutuhan masa kini tetapi tidak mengorbankan atau mengurangi kebutuhan generasi yang akan datang serta sehingga dapat menciptakan masyarakat yang dapat berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungan hidup. Berikut ini merupakan aspek yang mempengaruhi *sustainable development* menurut I Nyoman Sukma Arida (2017), yakni sebagai berikut:

a. Aspek ekonomi

Aspek ekonomi ini merupakan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi dan bagaimana mencari cara untuk memajukan ekonomi dalam jangka panjang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan Alam, masyarakat dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan generasi dimasa yang akan datang.

b. Aspek sosial budaya

Aspek sosial ini dipengaruhi oleh manusia sebagai bagaimana urutan dalam melakukan interaksi interelasi interdependensi. Aspek sosial yang menjadi perhatian utama adalah stabilitas penduduk alat pemenuhan kebutuhan dasar manusia terhadap keanekaragaman budaya dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan.

Aspek yang terdiri dari sosial sebagai berikut:

- 1) Memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan.

- 2) Menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya ekonomi dan keamanan.

Aspek yang terdiri dari pemerintahan sebagai berikut: Mendukung wakil rakyat dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mendorong kebesaran usaha dengan memberikan insentif, kebijakan dan sistem yang mendukung meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akurasi informasi meningkatkan akuntabilitas

c. Aspek lingkungan

Faktor lingkungan (ekologi) yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, aspek ekologi merupakan aspek yang banyak disorot ketika membahas tentang sustainable design. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak ini. Sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut:

- 1) Meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan
- 2) Meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumberdaya alam dan lingkungan
- 3) Melindungi modal alam yang kritis/penting

Dari konsep *sustainable development* sebelumnya, maka dijadikan pedoman dalam menerapkan *sustainable tourism*. Konsep *sustainable tourism* menurut Ruhanen (2013) merupakan penjabaran atau upaya



mengadopsi pendekatan prinsip *sustainable development*. Sedangkan menurut Helmu dan (Cooper, 2008) dalam (Junaid, 2020) memandang bahwa kebutuhan wisatawan dan masyarakat di destinasi wisata dapat terpenuhi tanpa mengabaikan generasi mendatang. Akan tetapi terdapat kecenderungan bahwa *sustainable tourism* lebih bersifat konseptual menurut Sinclair dan Jayawardana dalam (Junaid, 2020).

Berbeda halnya dengan pendapat Cronin (1990:15) dalam (Kristiana & Theodora M, 2016) menyebutkan bahwa konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagai pembangunan berfokus pada dua hal yakni keberlanjutan pariwisata sebagai aktivitas ekonomi dan disisi lain mempertimbangkan pariwisata sebagai elemen kebijakan pembangunan berkelanjutan yang luas. Sedangkan menurut Stabler dan Goodal dalam (Kristiana & Theodora M, 2016) mengatakan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan harus konsisten atau sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Jadi *sustainable tourism* ini merupakan pembangunan berfokus ekonomi yang menjamin agar sumber daya alam, sosial dan budaya yang dimanfaatkan untuk pembangunan pariwisata pada generasi ini agar dapat dinikmati untuk generasi yang akan datang serta didasarkan pada kriteria keberlanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak saja terkait dengan isu-isu lingkungan, tetapi juga isu demokrasi, hak asasi manusia dan isu lain yang lebih luas. Tak dapat dipungkiri, hingga saat ini konsep pembangunan berkelanjutan tersebut dianggap sebagai resep pembangunan terbaik, termasuk pembangunan pariwisata. Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dapat dikenali melalui prinsip-prinsipnya yang dielaborasi berikut ini. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1) Partisipasi,

Masyarakat setempat harus ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikan strategi yang telah disusun, mengawasi atau mengontrol pembangunan pariwisata dengan ikut terlibat dalam menentukan visi pariwisata, mengidentifikasi sumber-sumber daya yang akan dipelihara dan ditingkatkan, serta mengembangkan tujuan-tujuan dan strategi-strategi untuk pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata.

2) Keikutsertaan para pelaku (stakeholder),

Para pelaku yang ikut serta dalam pembangunan pariwisata meliputi kelompok dan institusi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), kelompok sukarelawan, pemerintah daerah, asosiasi wisata, asosiasi bisnis dan pihak-pihak lain yang berpengaruh dan berkepentingan serta yang akan menerima dampak dari kegiatan pariwisata.

3) Kepemilikan lokal,

Pembangunan pariwisata harus menawarkan lapangan pekerjaan yang berkualitas untuk masyarakat setempat. Fasilitas penunjang

kepariwisataan seperti hotel, restoran, dsb. seharusnya dapat dikembangkan dan dipelihara oleh masyarakat setempat. Beberapa pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan bagi penduduk setempat serta kemudahan akses untuk para pelaku bisnis/wirausahawan setempat benar-benar dibutuhkan dalam mewujudkan kepemilikan lokal. Lebih lanjut, keterkaitan (linkages) antara pelaku-pelaku bisnis dengan masyarakat lokal harus diupayakan dalam menunjang kepemilikan lokal tersebut.

4) Penggunaan sumber daya secara berkelanjutan,

Pembangunan pariwisata harus dapat menggunakan sumber daya dengan berkelanjutan yang artinya kegiatan-kegiatannya harus menghindari penggunaan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (irreversible) secara berlebihan. Hal ini juga didukung dengan keterkaitan lokal dalam tahap perencanaan, pembangunan dan pelaksanaan sehingga pembagian keuntungan yang adil dapat diwujudkan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pariwisata harus menjamin bahwa sumber daya alam dan buatan dapat dipelihara dan diperbaiki dengan menggunakan kriteria-kriteria dan standar-standar internasional.

5) Mewadahi tujuan-tujuan masyarakat,

Tujuan-tujuan masyarakat hendaknya dapat diwadahi dalam kegiatan pariwisata agar kondisi yang harmonis antara pengunjung/wisatawan, tempat dan masyarakat setempat dapat terwujud. Misalnya, kerja sama dalam wisata budaya atau cultural tourism partnership dapat

dilakukan mulai dari tahap perencanaan, manajemen, sampai pada pemasaran.

6) Perhatian terhadap daya dukung,

Daya dukung atau kapasitas lahan yang harus dipertimbangkan meliputi daya dukung fisik, alami, sosial dan budaya. Pembangunan dan pengembangan harus sesuai dan serasi dengan batas-batas lokal dan lingkungan. Rencana dan pengoperasiannya seharusnya dievaluasi secara reguler sehingga dapat ditentukan penyesuaian/perbaikan yang dibutuhkan. Skala dan tipe fasilitas wisata harus mencerminkan batas penggunaan yang dapat ditoleransi (*limits of acceptable use*).

7) Monitor dan evaluasi,

Kegiatan monitor dan evaluasi pembangunan pariwisata berkelanjutan mencakup penyusunan pedoman, evaluasi dampak kegiatan wisata serta pengembangan indikator-indikator dan batasan-batasan untuk mengukur dampak pariwisata. Pedoman atau alat-alat bantu yang dikembangkan tersebut harus meliputi skala nasional, regional dan lokal.

8) Akuntabilitas,

Perencanaan pariwisata harus memberi perhatian yang besar pada kesempatan mendapatkan pekerjaan, pendapatan dan perbaikan kesehatan masyarakat lokal yang tercermin dalam kebijakan-kebijakan pembangunan. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam seperti tanah, air, dan udara harus menjamin akuntabilitas serta

memastikan bahwa sumber-sumber yang ada tidak dieksploitasi secara berlebihan.

9) Pelatihan

Pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan pelaksanaan program-program pendidikan dan pelatihan untuk membekali pengetahuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan bisnis, vocational dan profesional. Pelatihan sebaiknya meliputi topik tentang pariwisata berkelanjutan, manajemen perhotelan, serta topik-topik lain yang relevan.

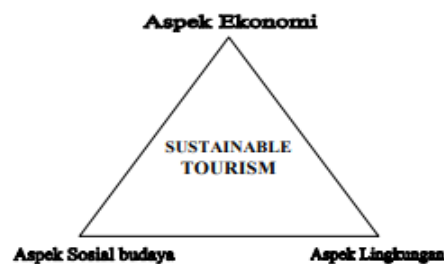
10) Promosi.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan juga meliputi promosi penggunaan lahan dan kegiatan yang memperkuat karakter lansekap, *sense of place*, dan identitas masyarakat setempat. Kegiatan-kegiatan dan penggunaan lahan tersebut

Sedangkan untuk dimensi *sustainable tourism* menurut Sinclair, dkk (2003) terdiri dari aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan lingkungan.

- a. Aspek Ekonomi. Salazar (2012) dalam Wray (2011) berpendapat bahwa aspek ekonomi menitikberatkan pada bagaimana masyarakat di destinasi wisata memperoleh pendapatan (*income*) atau manfaat ekonomis dari aktivitas pariwisata. Masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) perlu dilibatkan dalam bentuk partisipasi aktif sebagai pelaku pariwisata.

- b. Aspek Sosial dan Budaya. *Sustainable tourism* diharapkan menjadi alat atau media menunjang pelestarian sumber daya alam dan budaya yang dimanfaatkan sebagai aset wisata.
- c. Aspek Politik. Aspek politik tidak menjadi kajian meskipun dalam realita, aspek politik menjadi salah satu bahasan penting dari *sustainable tourism*.
- d. Aspek Lingkungan. Aspek lingkungan diartikan sebagai keberlanjutan pemanfaatan lingkungan dan menghindari dampak negatif yang ditimbulkan oleh adanya aktivitas pariwisata.



Gambar 1.6 Kerangka Konseptual *sustainable development*

Sumber: (Junaid, 2020)

### 1.5.2.7 Desa Wisata

Desa wisata adalah komunitas atau masyarakat yang terdiri atas penduduk pada suatu wilayah yang memiliki kesadaran untuk berperan bersama sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing guna memberdayakan potensi yang ada di wilayahnya. Kemudian menurut Nuryanti dalam (Yuliati & Suwandono, 2016) Desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan menurut Joshi, Desa wisata

(*rural tourism*) merupakan pariwisata yang terdiri dari keseluruhan pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi, unsur-unsur unik yang secara keseluruhan dapat menarik minat wisatawan.

Widi Kurniawan (2005) dalam (Kadek et al., 2017) mengatakan bahwa pengembangan desa wisata merupakan suatu bentuk pariwisata dengan objek dan daya tarik wisata berupa kehidupan desa yang memiliki ciri khusus dalam masyarakatnya, panorama alam, budaya yang dapat dijadikan sebagai peluang untuk komoditi bagi wisatawan. Masyarakat disini berperan sebagai pelaku utama dalam membangun kepariwisataan melalui kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Pokdarwis berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan, menjadi wadah peran dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa kriteria desa wisata yakni:

- a. Dekat dengan objek wisata yang sudah ada
- b. Memiliki potensi wisata seperti potensi sumber daya alam, potensi budaya, potensi pertanian atau perkebunan)
- c. Keterbukaan masyarakat desa
- d. Aksesibilitas

Kemudian menurut Pratiwi terdapat dua konsep utama desa wisata dalam (Kadek et al., 2017) yaitu:

1. Akomodasi adalah sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk.

2. Atraksi adalah seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti kursus tari, bahasa dan lain-lain yang spesifik.

Desa wisata dapat menjadi upaya untuk melestarikan dan memberdayakan potensi budaya lokal serta nilai-nilai kearifan lokal (Local Wisdom) yang ada di masyarakat. Menurut Kementerian Pariwisata dalam Buku Pedoman Desa wisata terdapat beberapa jenis-jenis desa wisata yang dapat menjadi pedoman antara lain:

- a. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya alam sebagai daya tarik utama seperti sekarang Lembah pantai sungai danau dan berbagai bentuk tentang alam yang unik lainnya
- b. Desa wisata berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yakni desa wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan budaya kehidupan sehari-hari masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian religi maupun bentuk aktivitas lainnya.
- c. Desa wisata kreatif Yaitu desa wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari setiap kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal baik berupa kerajinan maupun aktivitas kesenian yang menjadi daya tarik utama.
- d. Desa wisata berbasis kombinasi yakni desa wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih banyak daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam Budaya dan kreatif



Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan bentuk integrasi pariwisata antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Selain itu masyarakat desa wisata juga memiliki kesadaran untuk berperan bersama sesuai dengan keterampilan dan kemampuan masing-masing guna memberdayakan potensi yang ada di wilayahnya sehingga dapat menarik minat wisatawan. Dalam penelitian ini Desa Wisata Nongkosawit yang menjadi *locus* penelitian termasuk dalam jenis desa wisata berbasis kombinasi karena memiliki lebih dari satu daya tarik wisata yang dimiliki.

#### **1.5.2.8 Identifikasi Aktor (*Stakeholder*)**

Hertifah dalam (Tilano & Suwitri, 2019) berpendapat bahwa *stakeholder* merupakan seorang individu maupun kelompok organisasi baik laki-laki atau perempuan yang mempunyai kepentingan dan pengaruh dalam suatu kegiatan program pembangunan. Pendapat dari Hertifah sendiri sama dengan pendapat Schemer yang mengatakan *stakeholder in a process are actors persons, groups, or organization with a vested interest in the policy being promoted.*

Sedangkan menurut Gosalves dalam (Mahfud et al., 2014) *stakeholder* merupakan seseorang yang memberikan maupun terkena dampak dari suatu program atau kebijakan pembangunan bisa individu, komunitas, masyarakat maupun lembaga pemerintahan. Berikut ini merupakan tahapan pertama dalam menganalisis *stakeholders* menurut Reed dalam (Handayani & Warsono, 2017) adalah menetapkan pengaruh dan kepentingan, yakni:

- a. Subyek (*subjects*) merupakan aktor yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi namun pengaruhnya rendah.
- b. Pemain Kunci (*key players*) memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang tinggi.
- c. Pengikut lain (*Crowd*) memiliki tingkat kepentingan dan pengaruh yang rendah.
- d. Pendukung (*Contest setters*) memiliki tingkat kepentingan yang rendah namun pengaruh yang tinggi.

Terdapat berbagai macam pendapat terkait klasifikasi aktor maupun *stakeholder* yang akan dijabarkan pada analisis dibawah ini. yang pertama menurut Viney dalam (Purba et al., 2021) Aktor/Pemangku kepentingan dibedakan menjadi berikut:

- a) Aktor Primer, aktor ini merupakan aktor yang memiliki pengaruh dan fungsi yang sangat besar dan berarti. Aktor ini direkrut dengan *partner*.
- b) Aktor Sekunder, aktor ini memiliki pengaruh yang besar tetapi kepentingan yang rendah, aktor ini direkrut melalui *consult*.
- c) Aktor Sekunder Kedua (tersier), aktor ini memiliki pengaruh yang rendah akan tetapi memiliki kepentingan besar, aktor ini direkrut melalui metode *inform*.
- d) Aktor Sekunder Ketiga (Kwarter), aktor ini memiliki pengaruh dan kepentingan yang rendah. Aktor ini direkrut melalui *control*.

Hampir sama dengan peran *Stakeholders* dari Viney, menurut Maryono dalam penelitian (Handayani & Warsono, 2017), membagi *stakeholders* menjadi tiga kelompok yaitu:

1. *Stakeholders* primer, *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan kepentingan langsung dan ikut berperan dalam tahapan-tahapan kegiatan. *Stakeholder* primer ini juga terkena dampak secara langsung (positif atau negative) dari suatu kegiatan.
2. *Stakeholders* kunci, *Stakeholder* yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan serta memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.
3. *Stakeholders* sekunder atau pendukung, *stakeholder* yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana kegiatan. Namun mempunyai kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan. Sehingga dapat dikatakan bahwa *stakeholders* pendukung ini menjadi fasilitator dalam proses pengembangan suatu kegiatan meliputi para investor atau pihak swasta, LSM, dan peneliti.

Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan konsep dari Maryono (Handayani & Warsono, 2017) untuk mengidentifikasi aktor yang ikut terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Nongkosawit antara lain *stakeholders* primer, *stakeholder key* (kunci), dan *stakeholders* sekunder (pendukung).

Tabel 1.2 Identifikasi *Stakholder*

Identifikasi <i>Stakeholder</i>	Indikator
<i>Stakeholder</i> Primer	a. Tekena dampak langsung b. Terlibat dalam semua pelaksanaan
<i>Stakeholder</i> Sekunder	a. Kepedulian besar Tidak memiliki kepentingan langsung
<i>Stakeholder</i> Kunci	a. Kewenangan legal b. Bertanggung jawab pada kegiatan

Sumber: (Handayani & Warsono, 2017)

### **1.5.2.9 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pengembangan Pariwisata**

Faktor pendukung peran aktor menurut (Destiana et al., 2020) dalam pengembangan pariwisata adalah:

1. Nilai yang ada dan dibawa oleh masing-masing pemangku kepentingan
2. Komunikasi, dilihat dari seberapa sering antar aktor saling berkomunikasi, bekerjasama dan berkoordinasi baik secara lisan maupun tertulis untuk mencapai tujuan bersama
3. Kepercayaan, dilihat dari kepercayaan dari masing-masing aktor untuk menjalin kerjasama dengan aktor lain untuk mencapai tujuan bersama
4. Sumber kebijakan, dilihat dari bagaimana kebijakan yang ada dalam mewadahi hubungan antar aktor atau jaringan yang terbentuk dalam mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya menurut Widiastuti dalam (Damaris, 2020) menyatakan bahwa faktor pendorong yang mempengaruhi pengembangan desa wisata antara lain:

- a. Faktor Internal
  1. Adanya kesadaran dan kemauan masyarakat setempat untuk mengembangkan desa wisata
  2. Banyaknya potensi yang ada di desa wisata berupa potensi ekonomi maupun potensi lingkungan
  3. Terdapat banyak atraksi wisata
- b. Faktor Eksternal

Dukungan dan bantuan dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang sangat berperan terhadap kemajuan desa wisata

Menurut Yohanes Sulistyadi, dkk (2017), faktor-faktor yang mendukung dan menghambat atau berpengaruh terhadap prinsip *sustainable tourism development* yakni sebagai berikut:

- a. Perkembangan demografi. Menurut Kotler (2010), demografi merupakan suatu studi mengenai populasi manusia yang meliputi ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, distribusi pendapatan serta statistik lainnya yang terdiri dari:
  1. Ukuran populasi merupakan proses pengamatan perubahan pada demokrasi dalam suatu populasi. Dapat diartikan bahwa tingkat pertumbuhan populasi yang cepat pada suatu wilayah akan semakin mengurangi sumber daya alam dan mengurangi standar hidup penduduknya.
  2. Struktur merupakan penurunan tingkat kelahiran dan meningkatnya harapan hidup menunjukkan peluang untuk mengembangkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan populasi tersebut.
  3. Tingkat pendidikan merupakan hal penting untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kapasitas masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.
  4. Distribusi pendapatan yakni memahami bagaimana penghasilan didistribusikan dalam dan lintas populasi yang merupakan suatu informasi tentang daya beli dan pendapatan kelompok populasi

tersebut yang biasanya diuraikan berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.

b. Perkembangan ekonomi

Menurut Ireland Hitt dan Hoskisson (2007), Kesehatan perekonomian suatu bangsa mempengaruhi kinerja perusahaan individual maupun industri. Oleh Oleh karena sangat di diperlukan untuk agar mampu mengidentifikasi perubahan, tren, dan implikasi strategisnya. isu-isu ekonomi ini sangat erat Hubungannya dengan realitas lingkungan eksternal dari aspek hukum maupun politik.

c. Perkembangan politik dan hukum

Menurut Ireland Hitt dan Hoskisson (2007), Dan hukum adalah suatu arena Di mana organisasi maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan saling bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang diinginkan serta terdapat pengawasan terhadap badan hukum dan undang-undang.

d. Perkembangan sosial budaya

Aspek sosial budaya ini sangat berkaitan dengan sikap sikap dan nilai kultural dari suatu masyarakat. karena sikap Nilai-nilai membentuk fondasi suatu masyarakat dimana masyarakat selalu ikut serta untuk mendorong kondisi-kondisi dan perubahan demografis, ekonomi, politik dan hukum, serta teknologi.

e. Perkembangan teknologi

Teknologi ini mempengaruhi banyak unsur di masyarakat. Pengaruh teknologi muncul melalui produk-produk, proses-proses, dan materi

baru. Aspek teknologi ini meliputi institusi-institusi dan aktivitas-aktivitas yang terlibat dalam menciptakan pengetahuan baru.

f. Perkembangan globalisasi

Aspek globalisasi meliputi pasar global baru yang relevan, yang sedang berubah, peristiwa-peristiwa politik internasional yang penting, dan karakteristik Kultural dan institusional yang menentukan pasar global.

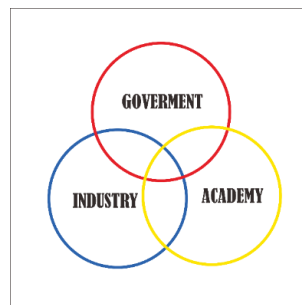
#### 1.5.2.10 Model *Helix*

Inovasi merupakan dasar dalam penciptaan daya saing serta pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara. Pencipta inovasi tersebut mulai di kenal dengan konsep *helix*. Beberapa konsep *helix* yang telah dikembangkan adalah *triplehelix*, *Quadruplehelix*, *Pentahelix* hingga *Hexa Helix*. (Sturesson, E., Lindmark, A., & Nilsson Roos, M. :2009). Selain itu konsep *Helix* ini juga didasarkan pada gagasan bahwa inovasi adalah hasil hubungan antara beberapa aktor. Dimana masing-masing aktor berperan dan bertindak sesuai fungsi kelembagaannya di dalam masyarakat. Berikut ini adalah beberapa Model *Helix*:

a) Model *Triplehelix*

Model *Triplehelix* dipopulerkan oleh Etzkowitz dan Leydesdorff (1995), Model *Triplehelix* dimulai dari sektor industri yang bertanggungjawab terhadap inovasi, kemudian bidang universitas bertanggungjawab untuk menciptakan pengetahuan yang kemudian saling berinteraksi dengan pemerintah selaku sektor ketiga. Industri, Universitas dan Pemerintah kemudian saling berinteraksi secara *top-down* untuk membuat inovasi yang diharapkan mampu

mengembangkan keadaan perekonomian suatu negara. Model *Triplehelix* dikembangkan berdasarkan ide tentang interaksi antara pelaku pengembangan inovasi yang dikenal sebagai bidang kelembagaan (Pemerintah, Universitas, Industri). Pada perkembangannya, model *Triplehelix* telah mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan inovasi dalam menjalankan sebuah industri kreatif. Lucy Yang Lu (2008) dan Etzkowitz (2008) menjelaskan bahwa terdapat tiga tahapan munculnya model inovasi *Triplehelix* yaitu: 1) Modifikasi internal tiap heliks; 2) Heliks yang saling mempengaruhi satu sama lain; 3) Terciptanya hal baru dalam jaringan 3 bidang; 4) Organisasi dari hubungan antara ketiga heliks. Model *Triplehelix* dapat digambarkan pada gambar di bawah:



Gambar 1.7 Model Triplehelix

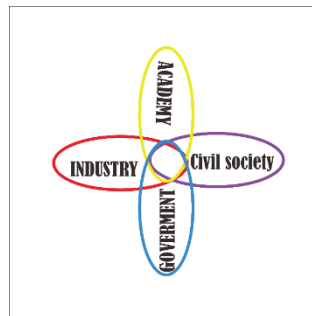
Sumber: Etzkowitz and Leydesdorff (2008)

b) Model *Quadruplehelix*

Kebijakan dan peran pemerintah, Masyarakat, Universitas dan Industri membentuk sebuah interaksi yang baik, efektif dan efisien. Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2009). Interaksi tersebut sesuai dengan model *Quadruplehelix* yang dijalankan dengan



menyeimbangkan antara Universitas, Industri dan Pemerintah dengan peran masyarakat. Para lulusan dari Universitas serta Industri menyediakan kebutuhan guna inovasi-inovasi, sedangkan pemerintah membuat sebuah regulasi serta dukungan baik berupa keuangan maupun dukungan lainnya guna kebijakan inovasi dan pelaksanaan strategi yang disusun. Masyarakat di sini sebagai aktor yang membutuhkan inovasi dan yang menggunakan serta mengaplikasikan ilmu, masyarakat juga harus berperan dalam sistem inovasi tersebut. Model *Quadruplehelix* memasukkan helix dari *Triplehelix* dan menambahkan peran masyarakat didalamnya. Pada *Quadruplehelix* tidak hanya terpaku pada pemerintah, Industri dan Universitas namun juga secara lebih luas menambahkan sosial di dalamnya. Model *Quadruplehelix* dapat digambarkan sebagai berikut:



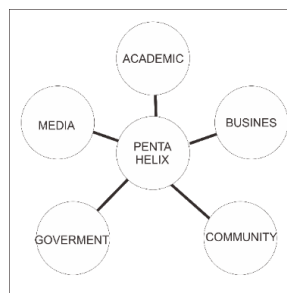
Gambar 1.8 Model Quadruplehelix

Sumber: Josphert Ngui Kimatu, (2016)

c) Model *Pentahelix*

Model analisis aktor *pentahelix* mendefinisikan pemangku kepentingan menjadi lima kelompok, yaitu: 1. Pemerintah (*Government*), 2. Pelaku Usaha (*Business*), 3. Akademisi, 4. NGO dan

Media Massa (Mohr dan Spekman, 1994). Jaringan 5 aktor tersebut diharapkan dapat saling berinteraksi secara sinergis sehingga terwujud suatu kualitas kebijakan yang berorientasi pada kepentingan umum. Model *Pentahelix* merupakan pengembangan dari model *triplehelix* dan *Quadruplehelix* yang disempurnakan menjadi 5 aktor dengan menambahkan media massa. (Rachim, A., Warella, Y., Astuti, R. S., & Suharyanto, S:2020).



*Gambar 1.9 Model Pentahelix*

Sumber: *Mohr dan Spekman (1994)*

### **1.6.Operasionalisasi Konsep**

*Sustainable Tourism development* merupakan suatu bentuk proses interaktif pengembangan pariwisata yang melibatkan berbagai aktor atau organisasi dalam bentuk kemitraan, kolaborasi, kompetisi dan negosiasi yang menggunakan prinsip partisipasi, akuntabilitas serta transparansi sehingga terselenggara pelayanan publik yang lebih baik. Pengembangan yang dilakukan pemerintah melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat untuk mengelola tata pemerintahan termasuk pengembangan pariwisata desa wisata dalam hal penyelenggaraan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan publik.

Fenomena penelitian ini adalah:

1. *Pengembangan pariwisata* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan suatu objek/daya tarik wisata yang memberi kemanfaatan.
  - a. Atraksi: sesuatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan berupa pertunjukkan yang diselenggarakan untuk wisatawan.
    - Wisata alam
    - Wisata budaya
    - Wisata buatan
  - b. Aktivitas: suatu kegiatan yang mudah dilakukan dan nyaman wisatawan baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan.
    - Wisata kuliner
    - Wisata edukasi
    - Wisata religi
  - c. Aksesibilitas: sarana yang akan memberikan kemudahan bagi wisatawan yang akan berkunjung.
    - Akses jalan
    - Transportasi umum
    - Petunjuk arah
    - Peta lokasi wisata
    - *Travel route*
  - d. Amenitas: prasarana kawasan wisata yang diciptakan oleh pelaku wisata.
    - Tempat penginapan
    - Tempat makan dan minum

- Fasilitas umum (Area parkir, toilet umum, mushola, toko oleh-oleh)
2. *Sustainable Tourism Development* merupakan pembangunan pariwisata yang menjamin kemanfaatan generasi mendatang dengan berfokus kepada aspek ekonomi, sosial dan budaya, lingkungan gejala yang diamati dilihat dari aspek.
- a. Aspek Ekonomi: *stakeholder* mendapatkan manfaat ekonomis dari aktifitas wisata.
    - Pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata
    - Jumlah lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata
  - b. Aspek Sosial dan Budaya: suatu media untuk menunjang pelestarian sumber daya alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai aset wisata.
    - Interaksi bertukar informasi dan budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan
    - Adanya kelompok sadar wisata
  - c. Aspek Lingkungan: upaya berkelanjutan dan menghindari dampak negatif dari pemanfaatan lingkungan sebagai aktivitas pariwisata.
    - Pengelolaan destinasi wisata menggunakan prinsip lingkungan (ekologi)
    - Dukungan dari masyarakat dalam upaya konservasi atau pelestarian budaya

3. Identifikasi *stakeholder* yang ikut serta adalah para pemangku yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pariwisata Desa Wisata Nongkosawit:
  - a. *Stakeholder* primer: yang memiliki pengaruh langsung dan ikut berperan dalam pengembangan pariwisata.
    - Terkena dampak langsung baik positif maupun negatif
    - Ikut terlibat dalam semua tahapan kegiatan pengembangan pariwisata
  - b. *Stakeholder* kunci: memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan serta memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.
    - Memiliki kewenangan legal
    - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata
  - c. *Stakeholder* sekunder: memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan tetapi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana kegiatan.
    - Memiliki kepedulian yang besar terhadap pengembangan pariwisata
    - Tidak memiliki kepentingan langsung dalam pengembangan pariwisata
4. *Model Helix* melalui model helix yang ikut serta adalah para pemangku yang berinteraksi langsung maupun tidak langsung dalam pengembangan pariwisata desa wisata Nongkosawit:

- a. *Triplehelix*: tiga aktor yang terlibat (akademis, pemerintah, industry)
  - b. *Quadruplehelix*: empat aktor yang terlibat (Universitas, Industri, Pemerintah, Masyarakat Sipil)
  - c. *Pentahelix*: lima aktor yang terlibat Universitas, Industri, Pemerintah, Masyarakat Sipil, Media Massa
5. *Faktor Pendukung sustainable tourism development* adalah faktor yang ikut mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Nongkosawit:
- a. Demografi: Mengenai populasi manusia yang meliputi ukuran populasi, struktur usia, distribusi geografis, distribusi pendapatan serta statistik.
  - b. Ekonomi: Mengidentifikasi perubahan, tren, dan implikasi strateginya seperti isu-isu ekonomi
  - c. Politik dan Hukum: Adanya organisasi maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan dan dasar hukum mengenai *sustainable tourism development*
  - d. Sosial Budaya: Berkaitan dengan sikap sikap dan nilai kultural dari suatu masyarakat lokal.
  - e. Teknologi: Pengaruh teknologi muncul melalui produk-produk, proses-proses, dan materi baru.
  - f. Globalisasi: Adanya pengaruh dari pasar global baru yang relevan dan sedang berubah seperti peristiwa-peristiwa politik internasional yang penting, dan karakteristik Kultural dan institusional.

## 1.7. Argumen Penelitian

### 1.8.1 Bangunan Teori

Partisipasi *stakeholders* dalam pengembangan pariwisata adalah salah satu variabel penting paradigma Administrasi Publik sebagai *governance*. Loffer dan Bovaird (2009: 164) juga mengemukakan bahwa elemen terpenting dalam *governance* berkaitan dengan skenario berbagai *stakeholder* ketika problem kolektif tak dapat dipecahkan hanya oleh otoritas publik. Dengan demikian, paradigma ini menjelaskan bahwa *Sustainable tourism development* dapat terlaksana melalui adanya sinergi antara ketiga aktor yang ada yaitu pemerintah itu sendiri (*public*), masyarakat (*community*) atau *civil society* (masyarakat madani) dan pihak swasta (*private*) yang mendudukan dirinya sesuai dengan kapasitas dan lingkupnya masing-masing, melakukan sinergi dalam rangka mencapai tujuan negara dan masyarakat serta menyelesaikan masalah publik (Utomo, 2008).

Pecapaian tujuan dan penyelesaian masalah publik dapat diatasi melalui manajemen publik. Manajemen publik berfokus pada internal organisasi sektor publik yang mengatur segala aktivitas organisasi sektor publik untuk mencapai tujuan organisasi (Keban, 2004). Manajemen publik meliputi rancangan program dan restrukturisasi organisasi, alokasi sumber daya melalui sistem penganggaran manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia, evaluasi program dan audit.

Dalam pelaksanaan *sustainable tourism development* melibatkan beberapa *stakeholders* yang dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok menurut Maryono yaitu *stakeholders* primer, *stakeholders* kuunci dan *stakeholders*

sekunder (Handayani and Warsono 2017). *Sustainable tourism development* dapat terlaksana melalui sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dari semua *stakeholders* (pemerintah, swasta dan masyarakat) sehingga membentuk suatu hubungan. Hubungan yang terbentuk dapat membentuk beberapa *helix* sesuai pada *stakeholders* yang terlibat di dalamnya. Beberapa konsep *helix* yang telah dikembangkan adalah *triplehelix*, *Quadruplehelix*, *Pentahelix* hingga *Hexa Helix*. (Sturesson, E., Lindmark, A., & Nilsson Roos, M. :2009). Permasalahan yang terjadi dapat dianalisis menggunakan faktor perkembangan demografi, perkembangan ekonomi, perkembangan politik hukum, perkembangan sosial budaya, perkembangan teknologi dan perkembangan globalisasi (Yohanes Sulityadi, dkk, 2017).

### **1.8.2 Riset Terdahulu**

Riset terdahulu digunakan untuk menambah wawasan dalam membantu keberhasilan penelitian. Riset terdahulu yang dilakukan oleh Fitri Handayani dan Hardi Warsono pada tahun 2017 berjudul Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang. Riset ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi *stakeholder* dan perannya (Maryono, 2005). Hasil penelitian ditemukan bahwa pengembangan objek wisata terdiri dari 3 *stakeholders* yaitu *pertama*, *stakeholder* primer merupakan *stakeholder* yang memiliki pengaruh dan terkena dampak secara langsung seperti terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal (membuka warung, petugas parkir dan karcis, pemandu wisata, dll), adanya interaksi bertukar informasi dan



budaya antara masyarakat lokal dan wisatawan serta partisipasi masyarakat seperti mengikuti sosialisasi terkait kepariwisataan dan adanya kelompok sara wisata). *Kedua, stakeholder* kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata serta adanya badan pengelola wisata sesuai peraturan yang legal (Badan Pengelola Pantai Karang Jahe (BP KJB) yang merupakan sub unit dari Bumdes dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga). *Ketiga, stakeholder* sekunder merupakan stakeholder yang memiliki kepedulian untuk memajukan pariwisata tetapi tidak memiliki kepentingan langsung seperti fasilitator pengembangan pariwisata meliputi pihak eksternal seperti investor, LSM dan peneliti (akademisi).

Riset selanjutnya dilakukan oleh Siti Fatimah dan Jefri Naldi yang berjudul *Implementation of The Pentahelix Approach Model Against Development Sustainable Tourism*. Dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Model *Pentahelix* menurut Arif Yahya merupakan kolaborasi dari 5 (lima unsur) unsur subjek atau pemangku kepentingan pariwisata, yaitu akademisi, bisnis, masyarakat, pemerintahan dan media. Biasa disingkat ABCGM. Pengembangan pariwisata di Kota Bukittinggi dari hasil penelitian menggunakan Model Pendekatan *Pentahelix*, yang melibatkan unsur: Akademisi, Bisnis, Pemerintahan, Masyarakat dan Media Massa.

Ilham Junaid, Mansyur, dan Andi Ulang (2020) dalam riset berjudul Implementasi Pariwisata Berkelanjutan di Pulau Maratua, Kabupaten Berau,

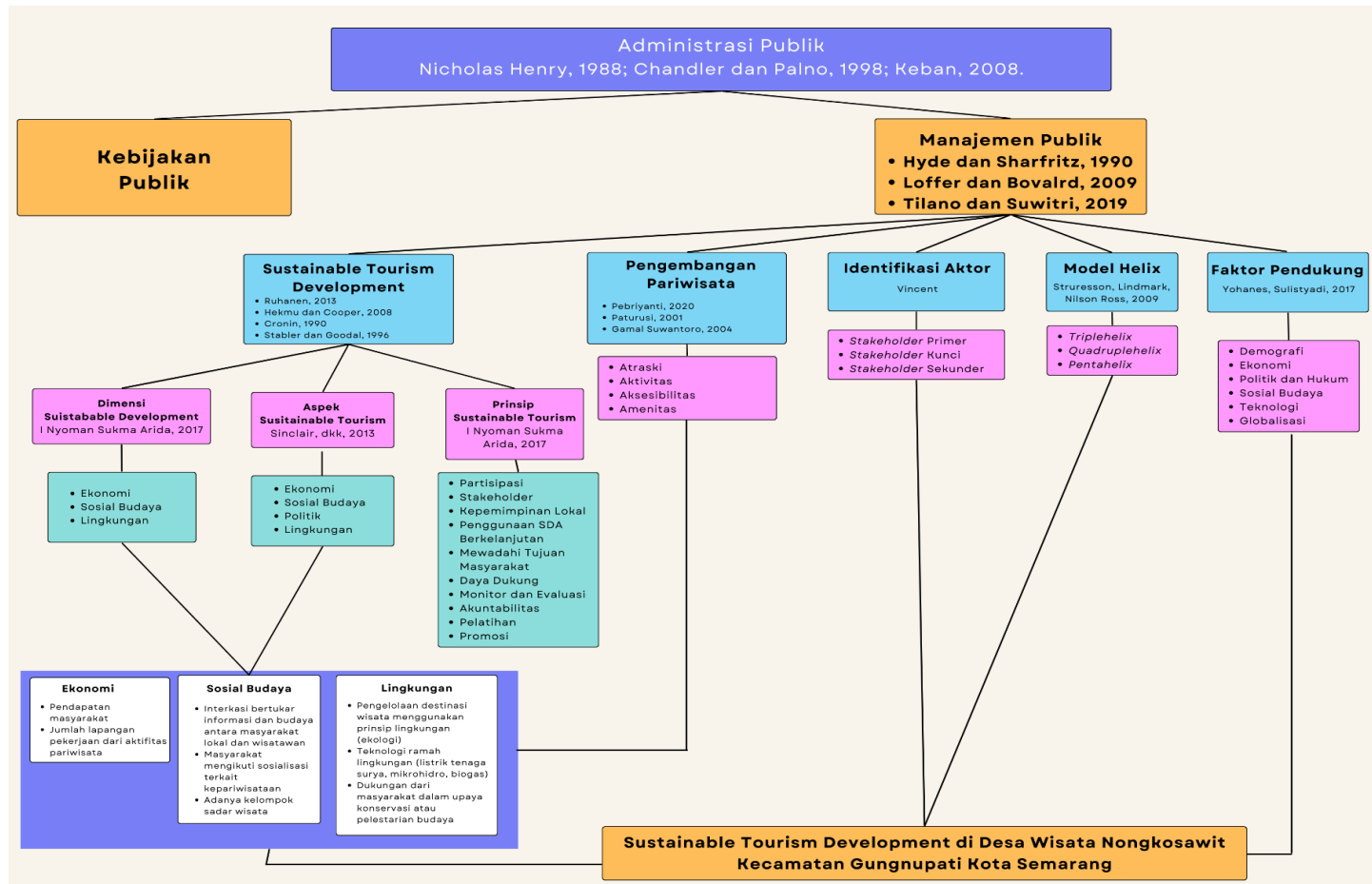
Kalimantan Timur menggunakan metode penelitian deksriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sustainable development merupakan hasil kesepakatan bersama akademisi dunia yang menekankan bahwa kebutuhan (*needs*) generasi saat ini dapat terpenuhi tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang (Junaid, 2020). Sinclair, dkk dalam (Junaid, 2020) menyatakan bahwa sustainable tourism terdiri dari aspek ekonomi merupakan manfaat ekonomis dari aktifitas wisata seperti masyarakat mendapatkan pendapatan serta terbukanya lapangan pekerjaan yakni sebagai pelaku pariwisata. Aspek sosial dan budaya adalah suatu media untuk menunjang pelestarian sumber daya alam dan budaya yang dapat dimanfaatkan sebagai aset wisata. Aspek politik tidak menjadi kajian dalam penelitian ini meskipun dalam realita, aspek politik menjadi salah satu bahasan penting dari *sustainable tourism*. Aspek lingkungan adalah upaya berkelanjutan dan menghindari dampak negaif dari pemanfaatan lingkungan sebagai aktivitas pariwisata.

### **1.8.3 Urgensi Penelitian**

*Sustainable tourism development* di Desa Wisata Nongkosawit mengalami permasalahan tidak optimalnya peran stakeholders dalam pengembangannya. Permasalahan ini dijabarkan menjadi enam yaitu, kurangnya dukungan dana pemerintah untuk desa wisata yang ada di pemerintahan tingkat kota, banyak pelatihan yang diselenggarakan pemerintah tidak tepat sasaran, kolaborasi antar *stakeholder* belum maksimal, komunikasi antar aktor belum berjalan dengan baik, masih rendahnya partisipasi dan peran masyarakat Desa Wisata Nongkosawit dalam pengembangan pariwisata serta kurangnya promosi dalam pengembangan pariwisata di Desa wisata Nongkosawit. Hal ini menimbulkan

berbagai permasalahan yaitu menurunnya pendapatan, berkurangnya semangat masyarakat lokal untuk berinovasi, dan rendahnya sumber daya masyarakat baik kuantitas maupun kualitas.

*Sustainable tourism development* desa wisata ini melatar belakangi penelitian karena terlihat jelas bahwa para pemangku kepentingan memiliki tugas dan peranannya masing-masing dalam pengembangan desa wisata. Selain itu *tourism development* dipandang sebagai alternatif meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Sehingga penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ditemukan di lapangan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang pengembangan pariwisata di Desa Nongkosawit. Pertanyaan penelitian yang akan dijawab adalah “Mengapa *Sustainable Tourism Development* Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang belum maksimal?”. Dengan begitu, penelitian ini penting untuk dilakukan.



Gambar 1.10 Kerangka Teoritis

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2022

## **1.8. Metodologi Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk memahami suatu masalah (Creswell, 2012). Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai suatu langkah atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan dan mengkaji informasi yang didapat guna memahami dan memecahkan masalah yang ingin diteliti. Pada setiap peneliti biasanya memiliki metode penelitiannya sendiri. Metode penelitian sendiri diartikan sebagai sekumpulan ilmu tentang tata cara (metode) yang tersusun dan masuk akal dalam mencari data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian tertentu.

### **1.8.1 Desain Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. Pada pendekatan kualitatif ini data diperoleh dari berbagai sumber untuk menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai metode dan sumber perolehan data. Biasanya peneliti memperoleh data dari wawancara secara langsung objek penelitian. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif. Dengan cara terjun langsung ke lapangan dan berinteraksi secara langsung dengan para aktor yang terlibat.

Kegiatan terakhir adalah penyusunan laporan struktur dan fleksibel. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan objek penelitian maupun hasil penelitian. Adapun pengertian

deskriptif menurut Sugiyono (2012:29) adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum. Sehingga dalam penyusunan laporan penelitian ini dapat mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari penelitian terkait *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang.

### **1.8.2 Situs Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat yang digunakan sebagai penelitian. Dalam penelitian tentang *Sustainable Tourism Development* di Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang dilakukan di Desa Wisata Nongkosawit. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan pada data yang menyatakan bahwa Desa Wisata Nongkosawit merupakan desa wisata yang memiliki jumlah kunjungan wisatawan yang paling rendah diantara ketiga desa wisata yang ada di Kota Semarang.

### **1.8.3 Fenomena Penelitian**

*Sustainable Tourism Development* Desa Wisata Nongkosawit Kecamatan Gunungpati Kota Semarang, Fenomena peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.3 Fenomena Penelitian

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian	Informan
1	Pengembangan Pariwisata	<b>Atraksi</b> adalah sesuatu yang dapat dilihat dengan indera penglihatan yang dapat menarik wisatawan	1. Wisata alam 2. Wisata budaya 3. Wisata buatan	1. Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang 2. Pengelola Desa Wisata/ POKDARWIS (kelompok sadar wisata) 3. Kepala/Pegawai Kantor kelurahan Nongkosawit 4. Ketua/Pengurus PKK 5. Masyarakat Kelurahan Nongkosawit 6. Akademisi 7. Karang Taruna 8. Media Massa
		<b>Aktivitas</b> adalah suatu kegiatan yang mudah dilakukan dan nyaman wisatawan baik di dalam ruangan maupun diluar ruangan	1. Wisata kuliner 2. Wisata edukasi 3. Wisata religi	
		<b>Aksesibilitas</b> adalah sarana yang akan memberikan kemudahan bagi wisatawan	1. Akses jalan 2. Transportasi umum 3. <i>Travel route</i> 4. Petunjuk arah 5. Peta lokasi wisata	
		<b>Amenitas</b> adalah prasarana di kawasan wisata	1. Penginapan (akomodasi) 2. Tempat makan dan minum 3. Fasilitas Umum	
2	<i>Sustainable tourism development</i>	Aspek Ekonomi adalah manfaat ekonomis dari aktifitas wisata	1. Pendapatan masyarakat dari sektor pariwisata 2. Jumlah lapangan pekerjaan dari sektor pariwisata	
		Aspek Sosial Budaya merupakan Partisipasi Masyarakat Lokal	1. Bentuk pelestarian budaya 2. Adanya kelompok sadar wisata	
		Aspek Lingkungan Pemanfaatan lingkungan berkelanjutan	1. Penerapan pengelolaan destinasi wisata menggunakan prinsip lingkungan (ekologi) 2. Dukungan dari masyarakat dalam upaya konservasi atau pelestarian budaya	

No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
3	Identifikasi Aktor	<i>Stakeholders</i> Primer merupakan <i>stakeholder</i> yang memiliki pengaruh langsung dan ikut berperan dalam pengembangan pariwisata.	1.Terkena dampak langsung dari pengembangan pariwisata ( <i>negative</i> atau positif) 2.Ikut terlibat dalam semua tahapan kegiatan pengembangan pariwisata
		<i>Stakeholders</i> Kunci merupakan <i>stakeholder</i> yang memiliki kewenangan legal dalam hal pengambilan keputusan serta memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata.	1.Memiliki kewenangan legal 2.Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata
		<i>Stakeholders</i> Sekunder merupakan <i>stakeholder</i> yang memiliki kepedulian yang besar terhadap proses pengembangan tetapi tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu rencana kegiatan.	1.Memiliki kepedulian yang besar terhadap pengembangan pariwisata 2.Tidak memiliki kepentingan langsung
4	Model <i>Helix</i>	<i>Tripehelix</i>	Universitas, Industri, Pemerintah
		<i>Quadrupelhelix</i>	Universitas, Industri, Pemerintah, Masyarakat Sipil
		<i>Pentahelix</i>	Universitas, Industri, Pemerintah, Masyarakat Sipil, Media Massa



No	Fenomena	Sub Fenomena	Gejala Penelitian
5	Faktor pendukung <i>Sustainable Tourism Development</i>	Demografis	Mengenai populasi manusia yang meliputi struktur usia, distribusi geografis, distribusi pendapatan dan pendidikan
		Ekonomi	Mengidentifikasi perubahan, tren, dan implikasi strategisnya. Isu-isu ekonomi terkait pengembangan pariwisata
		Politik dan Hukum	Adanya organisasi maupun kelompok-kelompok yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata dan dasar hukum terkait pengembangan <i>sustainable tourism development</i>
		Sosial Budaya	Sikap-sikap dan nilai kultural dari masyarakat terhadap wisatawan
		Teknologi	Dampak perkembangan teknologi terhadap pengembangan pariwisata melalui produk-produk, proses, dan materi baru
		Globalisasi	1.Trend atau yang sedang berubah, 2.Peristiwa-peristiwa politik internasional yang penting, 3.Kultural dan institusional

#### 1.8.4 Subjek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan individu maupun kelompok yang berperan sebagai penyedia data informasi yang paham dengan fenomena yang akan diteliti sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing. Dalam penelitian ini mengidentifikasi pemangku kepentingan dan peran masing-masing yang termasuk dalam model *pentahelix*, yaitu pemerintah, masyarakat, sektor swasta, media massa dan universitas. Informan utama dalam penelitian ini adalah Pokdarwis Desa Nongkosawit dan Kepala dinas pariwisata dan kebudayaan.

Teknik pemilihan informan pada penelitian ini adalah teknik *Purposive Sampling* dan *Snowball*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu (Sugiyono, 2008) maka untuk menentukan informan kunci menggunakan teknik *purposive sampling*. Namun, teknik *snowball* merupakan teknik memilih sampel secara sadar sesuai kebutuhan dan pemilihan informan kedua dan selanjutnya berdasarkan informasi dan rekomendasi dari informan sebelumnya sampai seterusnya. Teknik *Snowball* ini digunakan untuk menentukan informan berikutnya yang dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang ditunjuk sebagai lokasi penelitian.

Adapun informan dari penelitian ini yaitu *Stakeholders* yang terlibat langsung dan mengetahui secara mendalam mengenai pengembangan pariwisata desa Nongkosawit di kota Semarang. Informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang
2. Pengelola Desa Wisata/ POKDARWIS (kelompok sadar wisata)
3. Kepala/Pegawai Kantor kelurahan Nongkosawit
4. Ketua/Pengurus PKK
5. Masyarakat Kelurahan Nongkosawit
6. Akademisi
7. Karang Taruna
8. MediaMassa

### **1.8.5 Jenis Data**

Menurut Lofland dalam Moleong (2013:157-158) dalam penelitian kualitatif sumber data utamanya adalah kata-kata ataupun tindakan seperti wawancara, sumber tertulis, foto dan data statistik. Biasanya untuk memperoleh data kualitatif, peneliti membutuhkan dua sumber data. Sumber data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.

#### **a) Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian. Penelitian ini akan mewawancarai pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang, masyarakat sekitar,

pelaku sektor pariwisata serta aktor kepariwisataan yang terlibat dalam pengembangan pariwisata di Desa Nongkosawit.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen, regulasi, hasil-hasil studi, skripsi, tesis, disertasi, jurnal, berita dan informasi dari internet yang berhubungan dengan penelitian.

### **1.8.6 Teknik pengumpulan data**

Menurut Sugiyono (2009:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono (2009:225) juga menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Dilakukan di awal penelitian sehingga akan mempermudah dalam pelaksanaan wawancara di tahap berikutnya. Adanya modal observasi ini juga dapat dilakukan penanyaan secara langsung dengan sinkronisasi kenyataan dilapangan dengan pertanyaan yang nantinya akan diajukan. Observasi adalah pengamatan langsung untuk mendapatkan data.

Instrumennya berupa pedoman pengamatan, bias berbentuk daftar jenis kegiatan yang akan terjadi/diamati serta menggunakan sistem pengamatan tanda yang berupa gambaran singkat situasi tertentu. Melalui observasi tersebut, penulis dapat memahami konteks data dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu peneliti dapat melakukan observasi secara langsung untuk memperoleh bukti data yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pada observasi ini peneliti melakukannya dengan cara merekam informasi dan memfoto terkait fenomena pengembangan pariwisata yang ada di Desa Wisata Nongkosawit. Sebelum peneliti melakukan wawancara dengan informan, peneliti melakukan observasi ke Omah Pang yang merupakan tempat berkumpulnya Pokdarwis Kandang Gunung untuk bertukar pikiran dan peneliti berkeliling Desa Wisata Nongkosawit untuk melihat bagaimana infrastruktur, keadaan masyarakat, sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Nongkosawit.

b. Wawancara,

Tahapan selanjutnya dengan adanya modal observasi di lapangan maka dalam proses wawancara ini peneliti dapat melakukan pengecekan terhadap informasi yang disampaikan oleh informan dengan kondisi observasi yang telah dilakukan. Wawancara sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari data kepada narasumber. Wawancara ini yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan model interview guide terpimpin yakni wawancara menggunakan pedoman pertanyaan lengkap dan terperinci melalui kuesioner terbuka dan kuesioner langsung.

- (1) Kuesioner terbuka berisi pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban yang dikehendaki dengan kata-kata yang dipilih sendiri.
- (2) Kuesioner langsung, responden atau objek penelitian menjawab pertanyaan seputar dirinya.

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, artinya wawancara diijinkan membuat pertanyaan lebih fleksibel, arah pertanyaan lebih terbuka, namun tetap terkonsentrasi, sehingga diperoleh informasi yang mendalam tetapi tidak kaku. Wawancara pertama dilakukan dengan Ketua Pokdarwis Kandhang Gunung Bapak Suwarsono untuk menentukan informan selanjutnya peneliti menggunakan teknik *snowball*.

c. Studi Literatur

Teknik yang dijalankan secara beriringan di dalam penelitian dengan teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi memiliki peran dalam memperkuat informasi dari hasil wawancara dan observasi selama penelitian berlangsung. Peneliti menambahkan sumber informasi melalui studi literatur dokumentasi untuk berupa dokumen berbentuk publikasi dari Pokdarwis Kandhang Gunung maupun Dinas Kebudayaan dan Parwisata Kota Semarang, buku, artikel jurnal, media sosial (*instagram, Penta-Klabs dan Exovillage*) serta surat kabar elektronik.

Hasil dari dokumentasi dapat dijadikan sebagai bukti valid dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan yang disatukan ke dalam matriks penelitian untuk mempermudah peneliti menganalisa hasil wawancara. Setelah menyusun matriks penelitian kemudian melakukan

triangulasi sebagai langkah pengecekan validitas dan keabsahan antara data dan sumber. Hasil dari keseluruhan penelitian yang memiliki kesamaan maka hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan penelitian.

### **1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data**

Menurut Moloeng (2007: 248) analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengolah data, mengorganisasi data, mengkategorikan ke dalam unit-unit yang dikelola, menyusunnya, mencari dan menemukan pola, menemukan hal-hal penting dan belajar, serta memutuskan apa yang akan disampaikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan dalam pengolahan data sesuai yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa kegiatan analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau validasi.

#### **1. Reduksi Data**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penilaian berlangsung dan berlanjut sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

#### **2. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan upaya penyusunan sekumpulan informasi kedalam suatu matriks, bagan, grafik, uraian singkat, hubungan antar kategori atau bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data yang mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data kualitatif yang valid.

Penyajian data memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya setelah data yang disajikan dibahas secara rinci, maka selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan penelitian dengan melihat hasil reduksi data dan tetap mengacu pada perumusan masalah serta tujuan yang hendak dicapai. Data yang telah tersusun tersebut dihubungkan dan dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada.

Penarikan kesimpulan ini biasanya juga disebut sebagai interpretasi data. Interpretasi data merupakan upaya guna mendapatkan makna yang lebih dalam dari hasil penelitian yang masih berlangsung. Penulisan hasil penelitian dilakukan dengan menelaah hasil penelitian secara ketat dengan teori yang bersangkutan dan informasi akurat yang didapat dari lapangan. Lebih lanjut penelitian akan menggunakan Nvivo sebagai metode analisis data. Nvivo merupakan salah satu aplikasi komputer yang digunakan untuk mengolah data kualitatif yang diproduksi oleh QSR Internasional. Aplikasi ini dirancang untuk mengolah data kualitatif penelitian dengan informasi berbasis teks dan multimedia di mana diperlakukan data dalam skala kecil maupun besar.

#### **1.8.8 Kualitas data**

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian perlu dilakukan akurasi data yang didasarkan sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum.



Berbentuk validitas internal (alat ukur mencerminkan objek yang diukur) dan validitas eksternal (alat ukur dipakai pada penelitian berbeda). Keabsahan penelitian kita uji kualitasnya dengan cara melakukan Uji Kredibilitas yang menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moelong (2007:330) teknik triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang menggunakan isi lain (untuk kebutuhan pemeriksaan atau perbandingan dengan data) selain data itu sendiri dengan cara memeriksa sumber lain.

Sedangkan menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2016:372) mengartikan bahwa triangulasi sebagai pemeriksaan data dari sumber, metode, dan waktu. yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah uji validitas dengan memeriksa data yang didapat dari berbagai sumber.

b. Triangulasi Metode

Uji kualitas penelitian ini menggunakan triangulasi metode wawancara, observasi, dan survei yang bertujuan untuk memperoleh kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu. Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran

c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.

d. Triangulasi teknik

Triangulasi teknis adalah tes kredibilitas yang menggunakan wawancara, kemudian melalui studi pustaka, dokumentasi dan observasi, melalui teknik yang berbeda untuk mengecek data dari sumber yang sama.

Dalam penelitian ini untuk menguji validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber ini peneliti memeriksa data yang telah didapat dari berbagai sumber sedangkan untuk triangulasi metode peneliti menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya dengan orang yang berbeda tetapi masih sesuai dengan kriteria informan yang akan diwawancarai guna memperoleh informasi yang benar sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Setelah itu memastikan kebenaran atau validitas data dengan menganalisis data hasil wawancara dengan kondisi dilapangan dengan cara observasi dan juga dokumentasi.